

PROYEK TANKER PERTAMINA RP195 M BERBAU KORUPSI

KPK Usut PT Dok dan Perkapalan Surabaya

SURABAYA, BN - Satu unit kapal tanker pesanan PT. Pertamina (Persero) melalui PT.Djakarta Loyd dengan nilai kontrak sebesar Rp 195,580 milyar yang dibangun PT Dok dan Perkapalan Surabaya (DPS/Persero) pada tahun 2018 ternyata kini terbengkalai dan menjadi besi tua sejak tahun 2020. Palsunya DPS tidak dapat memenuhi kewajiban penyelesaian yang dijanjikan jatuh pada tahun 2021.

KAPAL tanker tersebut hingga kini masih bertenger di area pembangunan kapal DPS Jl.Perak Barat, Surabaya dalam kondisi memprihatinkan dan menjadi pemandangan dalam keadaan besi tua. Kapal tanker dengan panjang 90 meter dan lebar sekitar 18 meter itu

dijanjikan penyelesaiannya pada tahun 2021 dan saat ini dalam keadaan dibiarkan oleh Pertamina, Djakarta Loyd dan DPS.

Salah seorang koordinator para pegawai pensiunan yang di PHK dari DPS, Sulisty Purnomo kepada media **BIDIK NASIONAL** di Surabaya mengatakan, bahwa sewaktu mengalami progres pengerjaan sekitar 50 persen, kapal tanker berbobot mati 6500 ton itu mengalami mangkrak.

“Sudah menggunakan biaya sebesar Rp 80 milyar, kemudian pembangunannya terhenti dan mangkrak sampai detik ini”, jelas Sulisty didampingi puluhan pegawai pensiunan yang di PHK dari DPS dengan nada serius.

Diungkapkannya, biaya Rp 80 milyar dengan progres 50 persen itu merupakan total biaya yang diberikan oleh Djakarta Loyd ke DPS. “Ketika DPS meminta biaya untuk

pengerjaan selanjutnya ke Djakarta Loyd, tidak dicairkan mengakibatkan pembangunan kapal tanker itu terhenti sampai sekarang menjadi besi tua”, tandas koordinator tersebut.

Berdasarkan data di tangan Sulisty, pembangunan fisik kapal tanker itu total plat baja yang dibutuhkan sebanyak 9900 ton, namun baru dipergunakan sekitar 600 ton. “Lantas kemana sisa plat baja yang banyak itu sekarang dan juga sisa uang kontrak satu unit kapal tanker sebanyak Rp 115,580 milyar tersebut?”, paparnya bertanya.

Bersambung ke hal.11 kol.1



MANGKRAK : Kapal tanker yang mangkrak dibiarkan oleh DPS, Pertamina dan Djakarta Loyd di area pembangunan kapal DPS. (Foto: Ist/AK)

Proyek Kabel Optik Bawah Laut Rusak Pengaman Pantai Padang Galak

Diduga Belum Kantongi Izin Rekomtek

DENPASAR, BN - Bangunan pengaman pantai yang menjadi benteng kekuatan untuk melindungi daratan dari abrasi, erosi, dan hantaman gelombang air laut di wilayah pesisir Pantai Padang Galak, Denpasar Timur, kini tidak tersusun rapi lagi akibat dibongkar dilalui jalur tanam pipa kabel optik yang melintas dibawah Revetment, Senin, (21/9/2026).

Pipa HDPE 110 mm PN16 SDR11 PE100 MORAREPUBLIC 2026 2026.08.17 A M9 049 yang berada di lokasi Pada saat awak media ini bertanya kepada salah satu pekerja yang sedang melakukan pekerjaan pemotongan pipa di lokasi pesisir pantai padang galak, pekerja tersebut menyampaikan bahwa akan dilakukan penyambungan pipa kabel optik melewati dasar laut sepanjang 60 km dari pesisir Pulau Lombok sampai ke daratan pantai Padang Galak.

Dikonfirmasi terpisah, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Operasi

Bersambung ke hal.11 kol.5



Bangunan pengaman pantai aset Balai Wilayah Sungai Bali Penida yang dibongkar di pesisir Pantai Padang Galak, Kesiman, Denpasar Timur. (awi)

Percepat Perbaikan Desil, Dinsos Kabupaten Kediri Berikan Pembekalan Teknis Bagi Operator Desa



Bupati Kediri Hanindhito Himawan Pramana atau Mas Dhito.

KEDIRI, BN - Dinas Sosial Kabupaten Kediri memberikan pembekalan teknis aplikasi Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS-NG) Kementerian Sosial. Kegiatan yang melibatkan petugas operator di desa ini fokus mengenai mekanisme perbaikan desil.

Upaya ini dilakukan menindaklanjuti arahan Bupati Kediri Hanindhito Himawan Pramana atau Mas Dhito menyikapi banyaknya aduan terkait tingkat desil yang tidak sesuai dengan kondisi kesejahteraan masyarakat.

Kepala Dinas Sosial Kabupaten Kediri Subur Widono menyampaikan, desil atau peringkat kesejahteraan masyarakat dalam Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) ini menjadi acuan

dalam penyaluran bantuan sosial (bansos) supaya tepat sasaran.

Semenjak sosialisasi dilakukan, diakui banyak warga yang berbondong-bondong mengurus pembaharuan desil. Hingga September 2026 ini, tercatat sudah ada 24.905 warga Kabupaten Kediri datang ke desa melakukan pengurusan perbaikan desil.

“Petugas operator yang ada di desa ini menjadi garda depan, melalui aplikasi SIKS-NG ini mereka dapat mengusulkan pembaruan desil sesuai kondisi riil warga,” katanya ditemui disela kegiatan di Gedung Bagawanta Bhari Senin (28/9/2026).

Selain petugas operator desa, kegiatan tersebut juga diikuti pendamping PKH, Kasi Kesejahteraan Sosial serta Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan. Turut menjadi narasumber dalam kegiatan ini dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Kediri.

Menurut Subur, selain terkait desil, ada pula kasus warga yang dihentikan sebagai penerima bansos karena terindikasi atau terafiliasi judi online. Setidaknya, di Kabupaten Kediri berdasarkan data yang dimiliki ada 6.245 penerima bansos yang dihentikan.

Bagi mereka yang merasa tidak terlibat judi online dan namanya dicoret dari data penerima bansos dapat melakukan sanggahan atau klarifikasi.

Dalam kegiatan tersebut, lanjut Subur, peserta juga diberikan pembekalan mengenai mekanisme pengusulan ulang bagi warga yang sebelumnya dihentikan sebagai penerima bansos.

“Melalui kegiatan ini, kita berharap data kemiskinan yang ada sesuai kondisi riil masyarakat dan nantinya penyaluran program bantuan sosial dari pemerintah dapat tepat sasaran,” tegasnya.

(Advkominfokabkdr/ND)



Pembekalan teknis aplikasi Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS-NG) Kementerian Sosial.

Pemkab Kediri Siapkan Bandara Dhoho untuk Keberangkatan Haji Tahun 2027



Bupati Kediri Hanindhito Himawan Pramana (Mas Dhito)

KEDIRI, BN - Pemerintah Kabupaten Kediri terus berkoordinasi dengan Kementerian Haji dan Umrah untuk mempersiapkan fasilitas dan infrastruktur pendukung agar Bandara Dhoho bisa memberangkatkan jemaah haji pada 2027.

Hal itu dikatakan Bupati Kediri Hanindhito Himawan Pramana melalui Wakil Bupati Dewi Mariya Ulfa usai menghadiri Expo UMKM & Ekosistem Haji dan Umrah serta Kick Off Manasik Haji Nasional 2026 di Stadion Wilis, Kota Madiun, Jumat (25/9).

Menurut Mbak Dewi, Pemkab Kediri berharap Bandara Internasional Dhoho Kediri nantinya

dapat melayani jemaah haji dari 17 hingga 27 kabupaten/kota yang berangkat melalui bandara tersebut.

“Kita bersyukur dan berdoa bersama-sama semoga Bandara Dhoho bisa memberangkatkan haji di tahun 2027 bagi para jemaah haji,” ujarnya.

Untuk mewujudkan hal tersebut, Pemkab Kediri terus mempersiapkan agar kebutuhan jemaah dapat terlayani ketika Bandara Dhoho mulai digunakan sebagai titik keberangkatan haji.

Sementara itu, Menteri Haji dan Umrah RI Mochamad Irfan Yusuf menyampaikan, kick-off manasik bertujuan memberikan pemahaman kepada jemaah agar mampu menjalankan ibadah haji secara mandiri serta memahami wajib, rukun, dan sunnah haji.

Pihaknya juga terus berkoordinasi agar biaya haji tidak mengalami kenaikan drastis di tengah kondisi global yang berdampak terhadap sejumlah komponen biaya. “Terkait biaya haji, pemerintah bersama Komisi VIII DPR RI berupaya menjaga agar Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) tidak mengalami kenaikan drastis,” ungkapny.

Expo UMKM & Ekosistem Haji dan Umrah 2026 berlangsung pada 25–27 September 2026 di Kota Madiun. Kegiatan tersebut diisi berbagai agenda, di antaranya business matching, lomba tahfidz, fashion Islami, pengajian akbar, serta Sa’i Walk and Run.

(Advkominfokabkdr/ND)



Wabup Dewi Mariya Ulfa saat menghadiri Expo UMKM & Ekosistem Haji dan Umrah serta Kick Off Manasik Haji Nasional 2026 di Stadion Wilis, Kota Madiun.

Diduga Korupsi Dana Desa Rp 1,47 M, Kades Drokilo Diadili di PN Tipikor Surabaya

SURABAYA, BN – Kepala Desa (Kades) Drokilo, Kecamatan Kedungadem, Kabupaten Bojonegoro, Sutrisno, harus menghadapi proses hukum di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Surabaya. Ia didakwa melakukan tindak pidana korupsi dalam pengelolaan keuangan desa dan Bantuan Keuangan Khusus Desa (BKKD) dengan nilai kerugian keuangan negara mencapai Rp1.478.129.206,56.

DAKWAAN tersebut dibacakan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Muhammad Agung Dharmawan dalam persidangan. Dalam perkara ini, Sutrisno didakwa terkait pengelolaan anggaran Desa Drokilo pada Tahun Anggaran 2021, 2022, dan 2024. Menurut jaksa, Sutrisno yang menjabat sebagai Kades Drokilo periode 2019–2025 dan kemudian diperpanjang hingga 2027, diduga menguasai serta mengelola sendiri keuangan desa tanpa melibatkan Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD) sebagaimana mekanisme pengelolaan keuangan desa. Jaksa mengungkap, dugaan penyimpangan tersebut dilakukan melalui sejumlah kegiatan, salah satunya pekerjaan peningkatan

jalan aspal desa yang bersumber dari anggaran BKKD. Dalam pelaksanaannya, terdakwa disebut mencairkan anggaran tanpa dilengkapi Surat Permin-taan Pembayaran (SPP). Selain itu, terdapat pembayaran kegiatan yang menurut jaksa tidak didukung bukti pengeluaran yang sah. Tidak hanya itu, Sutrisno juga diduga menyusun laporan pertanggungjawaban (LPJ) yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya. Diduga Tunjuk Langsung Pelaksana Pengaspalan Dalam dakwaan-nya, JPU juga mengungkap adanya penunjukan langsung dalam pekerjaan pengaspalan jalan yang bersumber dari BKKD Tahun Anggaran 2021 dan 2022.

Sutrisno disebut menunjuk saksi FX Penny Siswo Ngulandoro dan CV Wira Niaga untuk mengerjakan proyek tersebut. Menurut jaksa, penunjukan dilakukan tanpa melalui mekanisme lelang maupun prosedur pengadaan barang dan jasa yang berlaku. Jaksa menilai rangkaian tindakan tersebut tidak sesuai dengan ketentuan dalam pengelolaan keuangan desa serta aturan pengadaan barang dan jasa pemerintah. Dugaan penyimpangan tersebut kemudian diaudit oleh Inspektorat Kabupaten Bojonegoro. Berdasarkan Laporan Hasil Audit Nomor X.700/2052/412.100/2025 tertanggal 21 Oktober 2025, kerugian keuangan negara akibat perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa mencapai Rp1.478.129.206,56.

Dijerat Pasal Berlapis
Atas perbuatannya, Sutrisno didakwa melanggar sejumlah ketentuan peraturan perundang-undangan, di antaranya UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Permen-



Kades Drokilo Sutrisno saat diadili.

dagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, serta ketentuan terkait pengadaan barang dan jasa dan pelaksanaan BKKD. JPU mendakwa terdakwa dengan Pasal 2 ayat (1) juncto Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP. Selain itu, Sutrisno juga didakwa

dengan Pasal 3 juncto Pasal 18 UU Tipikor sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP. Perkara tersebut kini bergulir di Pengadilan Tipikor Surabaya. Seluruh dugaan dalam dakwaan tersebut masih harus dibuktikan dalam proses persidangan, dan terdakwa memiliki hak untuk memberikan pembelaan sesuai ketentuan hukum yang berlaku. (pri)

Tingkatkan Profesionalisme, KWI Gelar Seminar dan Pelatihan Jurnalistik



Seminar dan Pelatihan Jurnalistik yang digelar KWI.

Fatchur Rohman, selaku Web Developer Literasi Digital, M. Khoirul Rijal, S.Sos., M.Sosio, Produser Program Info Jatim Kominfo Jatim, Dr. Zaibi Susanto, S.H., M.H., yang menyampaikan materi terkait hukum jurnalistik, serta Arju Herman sebagai praktisi jurnalistik. Dalam seminar dan pelatihan, membahas peningkatan kapasitas jurnalis dalam menghadapi perkembangan teknologi digital, penguatan literasi media, pemahaman hukum jurnalistik, serta peningkatan kualitas karya jurnalistik. Menurut Umar Hayat, A.Md., S.Pd., CFLE, C.LA-D., selaku Ketua Umum KWI, bahwa seminar dan pelatihan jurnalistik ini, guna mendorong peningkatan profesionalisme wartawan serta penguatan dalam berorganisasi pers di Indonesia. “Harapan dari kegiatan ini juga, agar para wartawan atau jurnalis yang tergabung dalam KWI, bisa meningkatkan keterampilan praktis dalam menulis, memahami etika jurnalistik, dan mengasah kemampuan berpikir kritis untuk menyaring informasi yang benar,” ucapnya. Selain itu, Kata Umar sapaan akrabnya, seminar dan pelatihan jurnalistik yang digelar KWI agar bisa membantu para wartawan untuk mengembangkan keterampilan menulis dan berkomunikasi teknik dan membantu pemahaman cara menulis berita artikel atupun opini secara efektif serta menarik. “Seperti penyusunan informasi berita yang memuat unsur 5W+1H (Who, What, Where, When, Why, How) dengan terstruktur, serta kepercayaan diri sebagai wartawan sangat diperlukan guna melatih kemampuan berbicara dan menyampaikan gagasan,” kata Umar. “Mudah-mudahan para wartawan yang tergabung dalam KWI bisa kompeten dan profesional serta menguasai keterampilan praktis (Hard Skills), mengasah Pola Pikir Kritis (Soft Skills), pemahaman etika dan menangkalk hoaks,” sambungny. Acara tersebut dilanjutkan dengan penyampaian materi oleh Dr. Zaibi Susanto, S.H., M.H., yang membahas tentang “Merilis Berita Standar Media Mainstream”. Dalam materi nya, ia menyampaikan siaran pers itu umumnya bersifat hard new yaitu aktual, faktual, penting, dan menarik. “Sebelum mengirim rilis kita harus membaca ulang rilis tersebut. Karena sebuah berita dikatakan bernilai apabila terkait dengan kepentingan berbagai sisi kehidupan manusia. Seperti dari segi aspek psikologikal, keamanan/keselamatan, hubungan antar personal, pengakuan, dan aktualisasi diri,” paparnya. Selanjutnya, materi kedua disampaikan oleh Arju Herman tentang “Hukum Pers dan Kode Etik Jurnalistik”, “kewajiban pers adalah memberitakan peristiwa dan opini dengan menghormati norma agama dalam rasa kesuksesan masyarakat serta asas praduga tak bersalah (presumption of innocent). (Abd. Rosi)

SURABAYA, BN – Guna meningkatkan profesionalisme dalam menjalankan tugas sebagai pewarta, Komunitas Wartawan Indonesia (KWI), menggelar seminar dan pelatihan jurnalistik, di Hotel Sahid Surabaya. Minggu (27/09/2026).

Acara yang diikuti seluruh wartawan dari berbagai media di Jawa Timur tersebut, mengusung tema ‘Meningkatkan Profesionalisme dan Kualitas Karya Jurnalistik’. Hadir pula berbagai sumber yaitu Fatchur Rohman, selaku Web Developer Literasi Digital, M. Khoirul Rijal, S.Sos., M.Sosio, Produser Program Info Jatim Kominfo Jatim, Dr. Zaibi Susanto, S.H., M.H., yang menyampaikan materi terkait hukum jurnalistik, serta Arju Herman sebagai praktisi jurnalistik. Dalam seminar dan pelatihan, membahas peningkatan kapasitas jurnalis dalam menghadapi perkembangan teknologi digital, penguatan literasi media, pemahaman hukum jurnalistik, serta peningkatan kualitas karya jurnalistik. Menurut Umar Hayat, A.Md., S.Pd., CFLE, C.LA-D., selaku Ketua Umum KWI, bahwa seminar dan pelatihan jurnalistik ini, guna mendorong peningkatan profesionalisme wartawan serta penguatan dalam berorganisasi pers di Indonesia. “Harapan dari kegiatan ini juga, agar para wartawan atau jurnalis yang tergabung dalam KWI, bisa meningkatkan keterampilan praktis dalam menulis, memahami etika jurnalistik, dan mengasah kemampuan berpikir kritis untuk menyaring informasi yang benar,” ucapnya. Selain itu, Kata Umar sapaan akrabnya, seminar dan pelatihan jurnalistik yang digelar KWI agar bisa membantu para wartawan untuk mengembangkan keterampilan menulis dan berkomunikasi teknik dan membantu pemahaman cara menulis berita artikel atupun opini secara efektif serta menarik. “Seperti penyusunan informasi berita yang memuat unsur 5W+1H (Who, What, Where, When, Why, How) dengan terstruktur, serta kepercayaan diri sebagai wartawan sangat diperlukan guna melatih kemampuan berbicara dan menyampaikan gagasan,” kata Umar. “Mudah-mudahan para wartawan yang tergabung dalam KWI bisa kompeten dan profesional serta menguasai keterampilan praktis (Hard Skills), mengasah Pola Pikir Kritis (Soft Skills), pemahaman etika dan menangkalk hoaks,” sambungny. Acara tersebut dilanjutkan dengan penyampaian materi oleh Dr. Zaibi Susanto, S.H., M.H., yang membahas tentang “Merilis Berita Standar Media Mainstream”. Dalam materi nya, ia menyampaikan siaran pers itu umumnya bersifat hard new yaitu aktual, faktual, penting, dan menarik. “Sebelum mengirim rilis kita harus membaca ulang rilis tersebut. Karena sebuah berita dikatakan bernilai apabila terkait dengan kepentingan berbagai sisi kehidupan manusia. Seperti dari segi aspek psikologikal, keamanan/keselamatan, hubungan antar personal, pengakuan, dan aktualisasi diri,” paparnya. Selanjutnya, materi kedua disampaikan oleh Arju Herman tentang “Hukum Pers dan Kode Etik Jurnalistik”, “kewajiban pers adalah memberitakan peristiwa dan opini dengan menghormati norma agama dalam rasa kesuksesan masyarakat serta asas praduga tak bersalah (presumption of innocent). (Abd. Rosi)

Gerindra Sidoarjo Tanggapi Lonjakan Elektabilitas Partai dan Rapor Merah Daerah



Ketua Dewan Penasehat DPC Gerindra Sidoarjo, H. Rahmat Muhajirin, SH, MH. (yah)

Ketua Dewan Penasehat DPC Gerindra Sidoarjo, H. Rahmat Muhajirin, SH, MH, didampingi Ketua Fraksi Gerindra sekaligus Sekretaris DPC Gerindra Sidoarjo, Ahmad Muzayyin Syafrial, dalam acara ngopi bareng bersama wartawan pada Selasa (8/9/2026).

Keberhasilan Program Pro Rakyat
H. Rahmat Muhajirin menegaskan bahwa meroketnya elektabilitas Gerindra di wilayahnya merupakan bukti konkret bahwa kebijakan pemerintah pusat berpihak pada rakyat kecil. Beberapa program unggulan seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), KDMP, serta program ketahanan pangan dinilai menjadi motor utama penggerak kepuasan publik. “Program-program tersebut sudah mulai dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Sidoarjo. Ini menjadi pendorong bagi kami di daerah untuk terus bekerja keras menjaga kepercayaan publik,” ujar Rahmat Muhajirin. Kendati menduduki posisi positif, Rahmat mengingatkan seluruh kader agar tidak terlena dengan hasil survei tersebut. Menurutnya, capaian ini adalah amanah yang harus dijaga melalui kerja nyata di lapangan agar kepuasan publik berjalan selaras dengan kenaikan elektoral partai.

Soroti Penurunan Kepuasan Kinerja Pemkab Sidoarjo
Di balik kabar baik bagi internal Gerindra, survei ARCI tersebut membawa catatan kritis bagi jalannya roda pemerintahan daerah. Tingkat kepuasan publik terhadap kepemimpinan pasangan Bupati Subandi dan Wakil Bupati Mimik (BAIK) dilaporkan merosot sebesar 14,3 persen selama 1,5 tahun masa jabatan mereka. Data tren tingkat kepuasan publik terhadap Pemkab Sidoarjo menunjukkan penurunan bertahap sebagai berikut: 100 Hari Pertama: 84,9%6 Bulan: 80,5%1 Tahun: 71,8%1,5 Tahun (Saat ini): 70,6%. Menanggapi data tersebut, Ahmad Muzayyin Syafrial menyatakan bahwa penurunan kumulatif sebesar 14,3 persen ini akan menjadi bahan evaluasi yang sangat serius bagi Gerindra sebagai salah satu partai pengusung pemerintah daerah. “Angka kepuasan 70,6 persen saat ini sebenarnya masih menjadi modal kepercayaan yang kuat. Namun, penurunan yang konsisten ini adalah peringatan dini (early warning) agar dilakukan evaluasi total demi perbaikan pelayanan kepada masyarakat ke depan,” jelas Muzayyin.

■ Bersambung ke hal.11 kol.5

BERITA MINGGUAN INVESTIGASI

BIDIK

NASIONAL

TERBIT SEJAK 1 JUNI 1999

PEMIMPIN UMUM : Pudji Leksono. PEMIMPIN REDAKSI/PENANGGUNGJAWAB : Edy Sutanto. PEMIMPIN PERUSAHAAN : Teddy Syah Roni. PENASEHAT HUKUM : Yustinus Haryanto, SH. REDAKTUR PELAKSANA : Budi Santoso. REDAKTUR : A Karim, EM Liswandi, Zaenal Ikhsan, Agus. TIM LIPUTAN KHUSUS : Toddy Pras Hendarto (Koordinator), Suprawoto, Suwoto, Supardi. JAWA TIMUR : SURABAYA : Dymas Ma'rufi Santoso, Abd Rossi, Ninik Rachmawati. SIDOARJO: Nur Yahya. GRESIK : Ariadi AM, Subkan Arif. PAMEKASAN : Ainur Halis. SUMENEP : Adi Yusman, Ishak. SAMPANG : Holillurohman. MOJOKERTO : Husnan. JOMBANG : Totok Agus Hariyanto (Kabiro), M. Taufik TULANG BAWANG/TULANG BAWANG BARAT : Indra Wijaya, Hendra Jaya. PRINGSEWU : Iskandar. BANDAR LAMPUNG : Suhartono Hariwibowo. TANGGAMUS : - NANGROE ACEH DARUSSALAM GAYO LUES : Sutrisno (Kabiro), Simson Sitepu. SUBULUSSALAM : Agus Darminto Bincin (Kabiro), Imran Cibro. ACEH SINGKIL :Roni Syehrani (Kabiro), Nurhalimah. BIREUM : Hendra S. BANGKA BELITUNG: Agusman Sirait (Kabiro), Tamrin. JAMBI, TANJUNG JABUNG BARAT: Joni Efendi. TEBO : Wendri Putra Rezky. NUSA TENGGARA BARAT : MATARAM: Hidayatul Aini (Kabiro). PAPUA : Junjungan Silalahi. LAYOUT/IT Nur Hayati PEMASARAN/ADMINISTRASI/KEUANGAN : Dita Zahra Amalia. PENERBIT : PT Bidik Nasional Pers (BNP). AKTE NOTARIS : LUTFI AFANDI, SH, M.Kn No 19 Tgl 19 Desember 2014. SK MENKUMHAM : No AHU-0003466.AH.01.01 Tgl 26 Januari 2015. AKTE NOTARIS PERUBAHAN : Iwan Saleh Irawan, SH, No 02 Tgl 4 Februari 2020. SK MENKUMHAM PERUBAHAN : No AHU-0010003.AH.01.02. Tahun 2020 NOMOR INDUK KERUSAHA (JIB) BERBASIS RESIKO : 0220105231819. NPWP : 72.007.891.4-617.000. ALAMAT : Jl. Ikan Lele 2 Blok Ci No 14, Perum Bluru Permai, Kel. Bluru Kidul, Kec./Kab. Sidoarjo, Jawa Timur Kode Pos 61233. JAKARTA : Nl. Tentara Pelajar No. 35 RT.01/06 Jakarta 12210, Telp. 021-53661085. BANK: Rek Giro BRI Cabang Sidoarjo No. 0086-01-002254-30-8/ Rek Giro Bank Jatim Cab Sidoarjo No. 0261050731 An PT Bidik Nasional Pers. WEBSITE : https://bidiknasional.com.Percetakan : PT. Aksara Grafika Surabaya, Jl. Brigjen Katamso No. 45 Sidoarjo, Jawa Timur.

Dalam Menjalankan Tugas Jurnalistik Wartawan Bidik Nasional Dilengkapi Kartu Tanda Pengenal, Namanya Tercantum Dalam Box Redaksi, Dilindungi UU No 40 Tahun 1999 Tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik PENGADUAN HOT LINE : 08123209649, 087748103562, 031-99728729. Email: bidiknasional@yahoo.com/ bidiknasional1@gmail.com/bidiknasional2@gmail.com

SEGALA PUBLIKASI YANG DITERBITKAN DI MEDIA INI MERUPAKAN TANGGUNGJAWAB PENANGGUNGJAWAB REDAKSI

Mangga Podang Kantongi Sertifikat IG, Pemkab Kediri Fokus Jaga Populasi dan Kualitas



Wabup Kediri Dewi Mariya Ulfa menerima Sertifikat IG untuk komoditas mangga podang Lereng Wilis dari Menteri Hukum Republik Indonesia Supratman Andi Agtas di Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Timur, Jumat (18/9). (ist)

KEDIRI, BN - Pemerintah Kabupaten Kediri menyiapkan sejumlah langkah untuk menjaga populasi dan kualitas mangga podang Lereng Wilis setelah komoditas khas daerah tersebut menerima Sertifikat Indikasi Geografis (IG).

Mangga podang ini menjadi salah satu komoditas unggulan tanaman hortikultura yang terus dijaga Bupati Kediri Hanindhito Himawan Pramana. Populasi mangga podang ini banyak ditemui di wilayah Kabupaten Kediri khususnya barat sungai.

Menjaga mangga podang, selain melakukan pembelian bibit untuk peremajaan, secara kontinu juga dilakukan edukasi bagi petani supaya ikut menjaga kualitas buah. Seperti tidak melakukan booster supaya buah cepat masak.

“Kita juga terus mengedukasi petani untuk menjaga kualitas dari mangga podang itu,” kata Mas Dhito melalui Wakil Bupati Kediri Dewi Mariya Ulfa usai mengikuti sesi diskusi bertajuk “Pasti ada solusi” di Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Timur, Jumat (18/9).

Menurut Mbak Dewi, karakter mangga podang tidak lepas dari kondisi tanah di kawasan lereng Gunung Wilis. Kondisi tersebut membuat rasa dan teksturnya memiliki ciri khas yang berbeda ketika ditanam di luar kawasan tersebut.

Sertifikat IG untuk komoditas mangga podang Lereng Wilis itu diserahkan oleh Menteri Hukum Republik Indonesia Supratman Andi Agtas dan diterima Mbak Dewi mewakili Bupati Kediri Hanindhito Himawan Pramana.

Sertifikat ini diberikan setelah mangga podang Lereng Wilis melalui proses permohonan pendaftaran hingga tahap pemeriksaan substantif. “Dengan diterimanya sertifikat itu, mangga podang ke depannya bisa diproduksi semakin banyak dan mempercantik kemasan, tak kalah penting juga bagaimana kita menjaga lahan,” ucapnya.

Pihaknya berharap mangga podang mampu memiliki nilai jual yang semakin baik sehingga dapat bersaing dengan produk mangga yang dipasarkan di supermarket.

“Harganya diharapkan juga bisa bersaing dengan mangga-mangga yang ada di supermarket-supermarket,” tambahnya.

Kepala BRIDA Kabupaten Kediri Eko Setiyono menambahkan, potensi mangga podang dapat memberi dampak besar pada kesejahteraan masyarakat. Karena itu, masyarakat perlu ikut menjaga keberadaan pohon dan lahan penghasil mangga podang.

(Advkominfokabkdr/ND)

Satpol PP Jombang Loyo Hadapi Pabrik Ilegal PT Air Sun di Denanyar



JOMBANG, BN – Komitmen Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jombang dalam menggenjot Pendapatan Asli Daerah (PAD) di tengah geliat pembangunan dinilai menabrak tembok tebal. Lemahnya pengawasan dan penegakan Peraturan Daerah (Perda) oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Jombang diduga kuat menjadi celah subur bagi menjamurnya investasi bodong yang merugikan keuangan daerah.

Salah satu potret karut marut perizinan ini ditemukan pada operasional gudang yang dialihfungsikan menjadi pabrik industri oleh PT Air Sun di Desa Denanyar, Kecamatan Jombang. Berdiri di atas lahan seluas 2.019 m², aset milik Hartono Gunawan ini diduga kuat beroperasi secara ilegal karena menabrak peruntukan izin yang dikantongi.

Berdasarkan data yang dihimpun, PT Air Sun memegang Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) untuk “Gudang 1” yang diterbitkan pada 12 Agustus 2026 sebagai fungsi tempat penyimpanan. Namun pada praktiknya, bangunan bekas gudang padi tersebut justru disulap menjadi pabrik manufaktur yang memproduksi tiga jenis komoditas sekaligus, handset (alat pendengar), tas, dan sepatu.

■ Bersambung ke hal.11 kol.1

BPJS Kesehatan Cabang Sidoarjo Perkuat Sinergi Media untuk JKN Berkelanjutan dan Masyarakat Sehat

SIDOARJO, BN – BPJS Kesehatan Cabang Sidoarjo menggelar Media Gathering bertajuk “Sinergi Media untuk JKN Berkelanjutan dan Masyarakat Sehat” pada Selasa (22/9). Kegiatan tersebut menjadi momentum untuk memperkuat kemitraan antara BPJS Kesehatan dan insan pers dalam mengawal keberlangsungan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), sekaligus meningkatkan literasi kesehatan masyarakat.

Kepala BPJS Kesehatan Cabang Sidoarjo, Munaqib, menyampaikan bahwa keterlibatan media dalam keberlangsungan Program JKN memiliki peran yang lebih luas dari sekadar menyampaikan informasi. Menurutnya, media merupakan mitra strategis dalam membangun pemahaman dan kepercayaan masyarakat terhadap Program JKN. “Media bukan sekadar penyampai berita, melainkan jembatan informasi dan agen perubahan sosial,” ujar Munaqib.

Menurut Munaqib, peran tersebut semakin penting di tengah derasnya arus informasi yang berkembang saat ini. Media diharapkan dapat membantu masyarakat memperoleh informasi yang benar mengenai Program JKN, sekaligus turut menangkal informasi yang simpang siur, disinformasi, maupun berita hoaks yang berpotensi menimbulkan kesalahpahaman. “Media memiliki kekuatan besar untuk membentuk opini publik, meluruskan disinformasi atau berita hoaks, serta mengedukasi masyarakat secara objektif dan berimbang,” tegasnya.

Salah satu informasi mengenai layanan JKN yang masih kerap menimbulkan kesalahpahaman di masyarakat adalah anggapan bahwa BPJS Kesehatan menetapkan batasan lama hari rawat inap bagi peserta JKN. Munaqib menegaskan bahwa lama perawatan pasien bukan ditentukan oleh BPJS Kesehatan, melainkan menjadi kewenangan dokter yang menangani pasien berdasarkan kondisi medisnya. “BPJS Kesehatan tidak pernah menetapkan batasan hari untuk rawat inap. Lama atau tidaknya perawatan sepenuhnya menjadi kewenangan dokter



penanggung jawab pasien setelah melakukan anamnesa,” tuturnya.

Selain terkait informasi layanan, Munaqib juga menyoroti tantangan pembiayaan kesehatan yang tidak hanya berkaitan dengan keberlangsungan Program JKN, tetapi juga dengan meningkatnya kasus penyakit tidak menular (PTM). Hipertensi dan diabetes melitus menjadi perhatian karena kedua penyakit tersebut juga banyak ditemukan pada kelompok usia produktif yang memiliki mobilitas dan tingkat stres tinggi. “Tantangan terbesar finansial dan beban pembiayaan kesehatan saat ini justru bersumber dari meningkatnya kasus penyakit tidak menular, khususnya hipertensi dan diabetes melitus,” ungkapnya.

Sejalan dengan perhatian tersebut, Media Gathering turut diisi dengan sesi edukasi kesehatan bertema “Menenal dan Mencegah Penyakit Diabetes Melitus dan Hipertensi” yang disampaikan oleh dr. Nurul Hidayati. Dalam sesi tersebut, peserta diajak untuk lebih memperhatikan kondisi kesehatan melalui deteksi dini, mengingat hipertensi dan diabetes melitus dapat tidak menunjukkan gejala pada tahap awal namun berisiko menimbulkan komplikasi apabila tidak ditangani.

“Jangan menunggu sampai muncul gejala. Deteksi dini melalui pemeriksaan kesehatan rutin adalah kunci utama

Hari Tani, Mas Dhito Bangun Sumur Submersible di Semua Kecamatan Antisipasi Kemarau Panjang



Mas Dhito saat mengecek sumur Submersible

KEDIRI, BN - Memastikan produktivitas sektor pertanian tak terganggu saat musim kemarau, Bupati Kediri Hanindhito Himawan Pramana terus melakukan upaya membantu petani dalam menjaga pengairan lahan.

Upaya itu dilakukan dengan menyalurkan bantuan sarana infrastruktur irigasi pertanian. Mulai dari bantuan sumur submersible, jaringan pipanisasi, pembangunan parit hingga rehabilitasi jaringan irigasi tersier.

Bertepatan dengan peringatan Hari Tani Nasional 2026, secara serentak dibangun 26 titik sumur submersible di 26 kecamatan. Melalui bantuan ini, petani diharapkan tetap dapat mengaliri lahan dengan biaya yang lebih efisien.

“Tahun 2026 ini, sejak Bulan April kita telah mendapatkan imbauan akan menghadapi kemarau panjang, untuk itu kita terus berupaya membantu petani supaya tetap bisa memperoleh air,” kata Sukadi, Plt Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Kediri, Kamis (24/9).

Menurut Sukadi, sektor pertanian menjadi program strategis pemerintah pusat maupun pemerintah Kabupaten Kediri. Mas Dhito, sapaan akrab Bupati Kediri selama kepemimpinannya sangat konsen untuk membantu apa yang menjadi kebutuhan petani.

Berkolaborasi dengan pemerintah pusat, bantuan pertanian tiap tahun disalurkan kepada petani guna memastikan program swasembada pangan tetap terjaga. Di sisi lain, dengan bantuan tersebut produktivitas dapat dinaikkan.

Disebutkan Sukadi, secara keseluruhan pada 2026 berdasarkan data di Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Kediri, bantuan sumur submersible disalurkan kepada 451 kelompok atau gabungan kelompok tani. “Pembangunan sumur submersible ini memang menjadi program yang sangat ditunggu petani untuk mencukupi kebutuhan air,” ungkapnya.

Dengan pengairan lahan yang terjamin, lanjut Sukadi, indeks pertanaman (IP) di Kabupaten Kediri dapat dinaikkan satu kali masa tanam. Sebagai contoh, untuk komoditas padi, yang biasanya 2 kali tanam kini bisa 3 kali tanam dalam setahun.

“Peningkatan Indeks pertanaman ini, diharapkan dapat mewujudkan apa yang menjadi cita-cita Mas Dhito untuk meningkatkan kesejahteraan petani,” tambahnya.

Cita-cita itu semakin terlihat jelas dengan capaian peningkatan nilai tukar petani (NTP). Pada 2026, indikator untuk mengukur tingkat kesejahteraan petani ini mencapai 122, mengalami kenaikan dari capaian sebelumnya 113 ,05 di tahun 2025.

Sementara itu, secara terpisah Gatot Sujoko, perwakilan Kelompok Tani Jaya Desa Kebonrejo, Kecamatan Kepung mengakui merasakan betul perhatian Mas Dhito kepada petani.

Diterangkan, sebagai salah satu sentra tanaman cabai, saat musim kemarau petani di daerahnya sebelumnya mengandalkan pengairan melalui pembelian air dari tangki dengan biaya Rp 50 ribu/meter kubik.

Membantu pengairan lahan, pada 2021 pemerintah Kabupaten Kediri membantu kelompok tani dengan pembangunan embung untuk menyimpan air hujan. Supaya suplai air tetap aman, pada 2024 bantuan pun kembali diberikan untuk pembangunan Irigasi Tanah Dangkal (ITD).

Hanya saja karena jaringan listrik belum sampai lokasi, untuk menaikkan air masih harus menggunakan genset. Biaya yang dikeluarkan untuk pengairan lahan pun dapat ditekan hingga Rp10 ribu/meter kubik.

Di tahun berikutnya, upaya biaya operasional lebih efisien dibangun sumur submersible termasuk difasilitasi program listrik masuk sawah. Dengan bantuan tersebut, diyakini cakupan luasan lahan tanam yang sebelumnya bisa tercover 30 hektar akan meningkat. “Harapan kami bisa menambah setidaknya hingga 60 hektare,” ucapnya.

(Advkominfokabkdr/ND)



Salah satu proyek Sumur Submersible

Inovasi Barcode & Antar Obat di Instalasi Farmasi RS Sayidiman Magetan



Apt. Nur Aini, S. Farm, Kepala Instalasi Farmasi (ist)

MAGETAN, BN – Terobosan di Instalasi Farmasi Rumah Sakit (RS) Sayidiman Magetan yang dipimpin oleh apt. Nur Aini, S.Farm., berhasil mempermudah dan memperlancar pelayanan pengambilan obat bagi para pasien. Pelayanan pengantaran obat bagi pasien rumah sakit ini sebenarnya sudah berjalan sejak masa pandemi Covid-19 hingga sekarang. Menurut paparan Nur Aini, ada beberapa kriteria yang harus dipenuhi pasien, di antaranya harus mendaftar terlebih dahulu dan bersedia menunggu obat diantarkan ke rumah.

■ Bersambung ke hal.11 kol.5

Bupati Mutasi dan Rotasi Pejabat Pemkab Pamekasan

PAMEKASAN, BN - Bupati Pamekasan Dr Kholilurrahman SH,Msi melakukan mutasi & rotasi terhadap Aparatur Sipil Negara (ASN) pejabat Adiministrator di lingkungan pemerintah kabupaten Pamekasan yang di gelar di pendopo Mandhepa Agung Ronggosukowati Pamekasan, Jum'at malam,18/9/2026.

Prosesi pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan berdasarkan Keputusan Bupati Nomor 821.2/80/432.403/2026 terhadap 103 pejabat yang terdiri dari pejabat pimpinan tinggi pratama, administrator hingga pejabat pengawas di lingkungan pemerintah kabupaten Pamekasan tersebut berlangsung penuh khidmat.

Dalam sambutannya bupati Pamekasan Dr Kholilurrahman SH,Msi mengatakan proses mutasi & rotasi merupakan peristiwa hal yang biasa,sebab rotasi dan pengisian jabatan bukan sekedar perpindahan posisi dalam struktur pemerintahan akan tetapi, perubahan komposisi pejabat harus mem-



Bupati Pamekasan Dr. Kholilurrahman, SH, M.Si saat memutasi pejabat di lingkungan Pemkab Pamekasan.

berikan dampak terhadap peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat serta efektifitas penyelenggaraan pemerintahan. “Mutasi dan rotasi ini merupakan sebagai bentuk upaya penyelenggaraan organisasi dan pentingnya pelayanan publik untuk meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat serta peningkatan efektivitas kerja agar roda pemerintahan berjalan dengan baik,” tegasnya.

Kholil juga menekankan terhadap pejabat yang baru saja di lantik dan di ambil sumpahnya agar memiliki tanggung jawab dan bekerja secara profesional serta menjaga integritas di lingkungan pemerintah kabupaten pamekasan. “Saya tekankan kepada semua Aparatur Sipil Negara (ASN) yang baru saja di lantik agar bertanggung jawab dan menjalankan amanah sesuai tugas dan fungsi masing-masing,” pungkasnya.

(kholis)

Sengketa Tanah di Tarokan, PN Kab Kediri Gelar Pemeriksaan Setempat

KEDIRI, BN - Hari Jumat tanggal 26 September 2026, dilakukan pemeriksaan setempat terhadap obyek tanah seluas 1965 M2 beralamat di Desa Kedungsari, Kecamatan Tarokan, Kab. Kediri yang ber SHM No. 61 dilakukan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kab. Kediri bersama para pihak yang bersengketa.

Tahapan pemeriksaan setempat oleh Majelis Hakim adalah melanjutkan proses tahapan persidangan Gugatan Obyek Tanah tersebut yang digugat oleh Ema Prasetya Kustanti S. Psi beralamat di Kab. Kotawaringin Barat Propinsi Kalimantan Tengah, menggunakan kuasa hukum Ander Suwiwi Budi Prihatin, SH. MH. dkk.

Di saat ini obyek tanah ber SHM No. 61 seluas 1965 Meter persedi dikuasai oleh ahli Waris Moh Yahya bernama Achmad Taufan (34 Tahun) dan Mahanani Nursiasih (39 tahun), dua anak kandung Moh. Yahya. Pengacara ahli waris Moh. Yahya, Impi Yusnandar S.Sos.,SH.,MH.,M. AP.,MM., menguraikan, “Bahwa acara tahapan sidang di PN. Kab. Kediri dalam perkara Nomor: 107/Pdt.G/2026/



Hakim PN Kab Kediri ketika melakukan pemeriksaan di obyek tanah yang menjadi sengketa. (ist)

PN.Gpr perihal gugatan terhadap obyek tanah ber SHM No. 61 atas nama Moh. Yahya, obyek tanah yang beralamat di desa Kedungsari Kecamatan Tarokan Kab. Kediri, memasuki tahapan pemeriksaan setempat oleh Majelis Hakim di lokasi obyek tanah yang disengketakan. Tahapan tersebut adalah upaya Majelis Hakim meyakinkan bahwa obyek yang disengketakan benar - benar ada tidak sekedar naratif,” kata Impi.

Selanjutnya Impi Yusnandar juga menyampaikan, “Secara obyektif lahan ini dikuasai oleh ahli waris alm. Moh Yahya. Dalam pemeriksaan setempat bisa dilihat bahwa ahli waris sangat paham dengan batas - batas terhadap obyek tanah yang dimiliki, dan terbukti masih ada patok terpasang sejak

tahun 1975 dengan gambar dan jelas,” ujarnya.

Dalam penjelasannya Impi mengatakan, “Dalam acara pemeriksaan obyek bersengketa, secara data ada perbedaan terhadap bukti materil dan formil dari pihak Penggugat dengan kami, bahkan luasnya pun disebut berbeda, demikian pula batas - batasnya. Akan tetapi dalam membuktikan keberadaan obyek tanah di hadapan Majelis Hakim, ahli waris dapat secara akurat menunjukan batas patok- patok tanah. Apabila ada yang menggunakan data palsu tinggal melaporkan ke Kepolisian,” Impi Yusnandar menambahkan.

Sidang pemeriksaan lokasi obyek sengketa telah dilakukan oleh Majelis Hakim Pemeriksa perkara yang terdiri dari 3 (tiga) orang, 1 (satu) orang panitera pengganti, 1 (orang) petugas juru sita, dan 1 (satu) orang administrator. Rombongan Majelis, total berjumlah 5 (lima) orang. Selanjutnya di akhir pemeriksaan Majelis Hakim menyampaikan, “bahwa sidang selanjutnya dilaksanakan hari Selasa minggu depan,” ungkapnya. Pemeriksaan setempat diakhiri.

(agung mada)

Musdesus Desa Bayemgede Bojonegoro, Warga Tuntut Sekdes Topan Abdullah Mundur



Musdesus Desa Bayemgede Bojonegoro.

BOJONEGORO, BN - Reaksi tuntutan masyarakat Desa Bayemgede, Kecamatan Kepohbaru, Kabupaten Bojonegoro, terhadap Sekretaris Desa (Sekdes) Topan Abdullah bergulir. Warga menggelar Musyawarah Desa Khusus (Musdesus) di Balai Desa Bayemgede, pada Senin malam (28/9/2026).

Musdesus tersebut menjadi bagian dari rangkaian aspirasi masyarakat yang sebelumnya telah disampaikan pada 17 September 2026.

Dalam forum tersebut, masyarakat secara terbuka menyampaikan tuntutan agar Sekdes Topan Abdullah mundurkan diri atau diberhentikan dari jabatannya.

Tuntutan tersebut muncul karena masyarakat mempersoalkan sejumlah

hal, mulai dari kinerja, kedisiplinan kehadiran di kantor desa, persoalan domisili, hingga sikap yang dinilai arogan dan menimbulkan keresahan di tengah masyarakat.

Musdesus dihadiri Kepala Desa Bayemgede, perangkat desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Babinsa, Bhabinkamtibmas, ketua RT/RW, tokoh masyarakat, tokoh agama, PKK serta berbagai elemen masyarakat. Banyaknya warga yang hadir membuat Balai Desa Bayemgede dipenuhi peserta hingga meluber ke halaman balai desa.

Ketua BPD Bayemgede, Andig Bion Susanto, menyampaikan Musdesus tersebut merupakan tindak lanjut dari aspirasi masyarakat terkait tuntutan pemberhentian Sekdes.

Menurutnya, dari hasil pembahasan dalam forum, masyarakat menyatakan sikap secara bersama-sama agar Sekdes Topan Abdullah diberhentikan dari jabatannya.

“Acara ini merupakan rentetan tuntutan masyarakat untuk memberhentikan Sekdes. Dari hasil rapat, masyarakat kompak menuntut Sekdes untuk diberhentikan,” ungkap Andig.

Ia menjelaskan, sejumlah persoalan yang menjadi sorotan masyarakat antara lain kedisiplinan absensi kerja yang dinilai bermasalah, persoalan domisili, serta sejumlah kejadian yang selama ini menjadi perhatian warga.

Dalam forum tersebut juga disampaikan persoalan yang terjadi saat kegiatan karnaval Desa Bayemgede. Warga mempersoalkan sikap Sekdes dalam kejadian tersebut, termasuk dugaan tindakan terhadap pengelolaan parkir dan kondisi yang disebut masyarakat berkaitan dengan konsumsi minuman keras.

“Yang menjadi tuntutan masyarakat di antaranya persoalan arogansi, kejadian saat karnaval desa, persoalan parkir,

dugaan dalam kondisi mengonsumsi minuman keras, domisili yang tidak berada di Bayemgede, serta kedisiplinan absensi kerja yang selama ini dipersoalkan,” jelasnya.

Berbagai persoalan tersebut, lanjut Andig, menjadi bagian dari alasan masyarakat menyampaikan mosi tidak percaya terhadap Sekdes Topan Abdullah.

Masyarakat meminta agar aspirasi tersebut tidak berhenti pada Musdesus, namun ditindaklanjuti melalui mekanisme pemerintahan desa sesuai ketentuan yang berlaku.

Hasil Musdesus selanjutnya akan menjadi bahan bagi Pemerintah Desa Bayemgede untuk memproses usulan pemberhentian Sekdes melalui pemerintah kecamatan sebelum diteruskan ke tingkat kabupaten.

Sementara itu, salah satu warga yang hadir dalam Musdesus mengatakan, tuntutan pemberhentian Sekdes merupakan bentuk kekecewaan masyarakat terhadap sikap dan kinerja yang dinilai selama ini tidak sesuai dengan harapan warga.

“Intinya kami masyarakat Bayemgede menun-

LSM RATU Demo Soroti Galian Kabel Ilegal di Kediri



KEDIRI, BN - Lembaga Swadaya Masyarakat Rakyat Muda Bersatu (LSM RATU) mengadakan aksi demonstrasi damai di Kabupaten Kediri pada Jumat, 2 Oktober 2026. Aksi ini digelar sebagai bentuk komitmen kontrol sosial atas dugaan proyek

penggalian kabel bawah tanah ilegal yang belakangan ini viral di media sosial, khususnya di wilayah Kecamatan Pagu.

Ketua LSM RATU, Saiful Iskak, menegaskan bahwa praktik pembongkaran trotoar dan fasilitas publik tanpa izin resmi bukan sekadar pelanggaran administratif, melainkan tindak pidana pencurian dan perusakan aset vital negara. “Penggalian kabel bawah tanah secara ilegal adalah tindakan kriminal serius. Aparat Penegak Hukum (APH) wajib turun tangan untuk mengusut tuntas, menangkap pelaku, dan membongkar sindikat di balik aksi ini,” ujar Saiful dalam keterangan tertulisnya.

Menurut rencana, aksi yang dipimpin oleh Koordinator Demo Lapangan Hendrik Susanto ini akan melibatkan sekitar 50 massa serta perwakilan LSM. Para peserta aksi dijadwalkan berkumpul di Stadion Brawijaya Kota Kediri pada pukul 08.30 WIB dengan membawa sound system, bendera, banner, hingga ban bekas.

Adapun rute dan titik sasaran aksi meliputi empat instansi utama:

1. Dinas PUPR Kabupaten Kediri, untuk menuntut pertanggungjawaban fungsi pengawasan ruang milik jalan dan izin rekomendasi teknis.
2. Kantor Kejaksaan Negeri Kabupaten Kediri, guna mendorong proses penegakan hukum.
3. Kantor PT Telkom Kediri, selaku pemilik aset yang dirugikan, agar memperketat pengawasan serta melaporkan secara resmi pencurian infrastruktur telekomunikasi tersebut.
4. Setelah menjalankan ibadah salat Jumat, massa LSM RATU dijadwalkan bergerak ke Polres Kediri untuk menggelar audiensi langsung dengan pihak kepolisian.

Melalui aksi ini, LSM RATU mendesak Kapolres Kediri beserta jajaran Satreskrim untuk mengambil tindakan tegas memburu para pelaku galian kabel liar demi menjaga keamanan, ketertiban, serta menyelamatkan aset fasilitas publik di wilayah Kabupaten Kediri. (ND)

Polres Pelabuhan Tanjung Perak Bongkar Jaringan Pengedar Sabu



Dokumentasi Satresnarkoba Polres Pelabuhan Tanjung Perak

SURABAYA, BN - Satuan Reserse Narkoba (Satresnarkoba) Polres Pelabuhan Tanjung Perak menangkap dua jaringan peredaran narkoba jenis sabu di wilayah Surabaya. Dalam pengungkapan tersebut, polisi mengamankan tiga tersangka dan menyita barang bukti sabu dengan total berat sekitar 116,03 gram.

Kasus pertama terungkap di kawasan Pacarkeling, Tambaksari. Polisi mengamankan dua tersangka berinisial H.A.P (19) dan A.A (17). Dari tangan keduanya, petugas menemukan sabu seberat 15,31 gram beserta sejumlah barang bukti pendukung.

Menurut keterangan kepolisian, kasus tersebut merupakan hasil pengembangan penyelidikan terkait dugaan peredaran narkoba yang mendapatkan pasokan dari luar Surabaya. Polisi juga masih melakukan pengejaran terhadap pihak lain yang diduga menjadi pemasok.

Dalam pengungkapan kasus kedua, polisi menangkap G.S (35) di kawasan Bratang Wetan, Surabaya. Dari tersangka, petugas menyita tiga klip plastik berisi sabu dengan berat total 100,72 gram. Polisi menyebut barang bukti tersebut berkaitan dengan jaringan yang dikendalikan seorang bandar yang masih dalam pencarian.

Kasatresnarkoba Polres Pelabuhan Tanjung Perak AKP Adik Agus Putrawan mengatakan, pengungkapan tersebut merupakan bagian dari upaya kepolisian memberantas peredaran narkoba di wilayah hukum Polres Pelabuhan Tanjung Perak.

Selain sabu, polisi turut mengamankan sejumlah barang bukti pendukung dari kedua perkara tersebut, di antaranya timbangan elektrik, plastik pembungkus, telepon seluler, serta barang lainnya yang diduga berkaitan dengan aktivitas peredaran narkoba.

Atas perkara tersebut, para tersangka diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Penyidik juga masih melakukan pengembangan untuk mengungkap jaringan yang lebih luas serta mengejar pihak-pihak yang diduga terlibat.

Polres Pelabuhan Tanjung Perak menegaskan komitmennya dalam memberantas peredaran narkoba dan menjaga keamanan masyarakat di wilayah Surabaya. 23 September 2026. (Ninik)

Polisi Sidoarjo Beri Edukasi Pelajar Saat Upacara Senin



Inspektur Upacara Senin, 28 September 2026 di sekolah. Pembinaan upacara oleh pihak kepolisian ini juga menjadi momentum untuk mempererat sinergitas antara Polri dengan pihak sekolah, terutama dalam menciptakan lingkungan pendidikan yang aman dan kondusif.

Kapolresta Sidoarjo Kombes. Pol. Christian Tobing menjelaskan melalui kehadiran

■ Bersambung ke hal.11 kol.5

tut Sekdes selama diberhentikan. Selama ini sikap angkuh, arogan dan sikap yang dinilai tidak beretika ditunjukkan selama dia menjabat sebagai Sekdes,” ungkapnya.

Ia berharap pemerintah dapat menindaklanjuti hasil Musdesus secara objektif dan sesuai aturan, sehingga aspirasi masyarakat Bayemgede mendapatkan kejelasan.

Musdesus berlangsung dengan suasana serius. Warga yang hadir menyatakan sikap agar proses pemberhentian Sekdes Topan Abdullah dapat segera ditindaklanjuti melalui prosedur pemerintahan yang berlaku.

Dengan Musdesus tersebut, tuntutan masyarakat Bayemgede kini memasuki tahapan berikutnya, yakni proses pengajuan dan pembahasan usulan pemberhentian Sekdes melalui pemerintah desa, kecamatan hingga tingkat kabupaten. (pri)

Proyek JIAT BBWS Citanduy Diduga Berbau Korupsi



Aktivitas mesin bor proyek JIAT milik BBWS Citanduy di Desa Mangunjaya, Pangandaran. Pengeboran sedalam 135 meter di lokasi ini rencananya akan dipindahkan ke titik baru. (dok. foto: Asep Sujana)

PANGANDARAN, BN – Pekerjaan program Jaringan Irigasi Air Tanah (JIAT) di Dusun Poris, Desa Mangunjaya, Kecamatan Mangunjaya, Kabupaten Pangandaran, mendapat perhatian masyarakat. Pekerjaan yang disebut merupakan program BBWS Citanduy tersebut telah melakukan pengeboran hingga sekitar 135 meter.

Salah seorang warga RT 10/RW 02 mengatakan, proses pengeboran telah mencapai kedalaman tersebut, namun air yang diharapkan belum dapat dimanfaatkan. “Sudah sekitar 135 meter, tetapi air belum keluar,” ujar warga.

Warga juga mempertanyakan transparansi pekerjaan karena di lokasi yang didokumentasikan pada 23 September 2026 tidak terlihat papan informasi proyek. Masyarakat mengaku belum mengetahui secara jelas nilai anggaran, pelaksana, masa pelaksanaan maupun target teknis pekerjaan.

Kondisi tersebut bahkan membuat warga me-

nyebutnya sebagai “proyek siluman”. Namun, istilah tersebut merupakan ungkapan warga dan bukan kesimpulan bahwa pekerjaan tersebut ilegal.

Sementara itu, pelaksana pekerjaan memberikan penjelasan bahwa persoalannya bukan sekadar tidak adanya air.

Menurut keterangan pelaksana, air yang ditemukan pada proses pengeboran kualitasnya kurang bagus, sehingga belum dapat dijadikan sumber air untuk kebutuhan JIAT. Saat ini, pihak pelaksana masih mencari kemungkinan lokasi lain yang dianggap lebih sesuai. “Airnya kurang bagus, sekarang masih mencari lokasi dan akan diganti,” demikian keterangan pelaksana.

Keterangan tersebut menjadi penting untuk menjelaskan kondisi sebenarnya di lapangan. Dengan demikian, masyarakat perlu mendapatkan informasi lebih lanjut mengenai parameter apa yang digunakan untuk menyatakan kualitas air tersebut kurang baik, apakah berdasarkan hasil uji laboratorium atau indikator teknis lainnya.

Kajian Teknis: Bukan Sekadar Kedalaman 135 Meter

Secara teknis, keberhasilan sumur bor tidak cukup diukur dari kedalamannya. Sumur yang telah mencapai 135 meter belum otomatis dapat dikatakan berhasil ataupun gagal.

Beberapa aspek yang perlu diperhatikan antara lain kondisi akuifer, debit air, kualitas air, konstruksi sumur, serta hasil uji pemompaan dan pengujian kualitas air.

Jika air ditemukan tetapi kualitasnya tidak memenuhi kebutuhan yang direncanakan, keputusan untuk mencari titik alternatif dapat dijelaskan secara teknis. Namun, masyarakat berhak mengetahui dasar pengambilan keputusan tersebut. Pertanyaan pentingnya adalah: Apakah air pada titik pertama sudah dilakukan pengujian laboratorium?

Parameter apa yang menyebabkan air dinilai kurang bagus?

Berapa kedalaman pengeboran pada titik pertama?

Berapa target kedalaman dan debit JIAT?

Apakah titik baru masih berada dalam lokasi pekerjaan yang sama?

Apakah perubahan titik membutuhkan perubahan desain atau dokumen teknis?

Bagaimana pertanggungjawaban biaya pengeboran pada titik pertama?

Berapa batas waktu penyelesaian pekerjaan?

Papan Informasi Juga Menjadi Sorotan

Selain persoalan teknis, papan informasi kegiatan menjadi salah satu perhatian warga.

Papan informasi sangat penting untuk memberikan gambaran kepada masyarakat mengenai identitas pekerjaan. Setidaknya publik perlu mengetahui nama kegiatan, sumber dana, nilai pekerjaan, pelaksanaan dan waktu pelaksanaan.

Karena itu, BBWS Citanduy perlu memberikan penjelasan secara terbuka, terutama apabila memang

terdapat perubahan titik pengeboran.

Perubahan lokasi pekerjaan tentu bukan persoalan sederhana jika berkaitan dengan desain teknis dan target pekerjaan. Masyarakat perlu mengetahui apakah perubahan tersebut masih sesuai dengan perencanaan awal dan bagaimana mekanisme administrasinya.

Publik Menunggu Penjelasan BBWS

Program JIAT diharapkan mampu memberikan manfaat nyata bagi sektor pertanian. Karena itu, masyarakat tidak hanya membutuhkan penjelasan bahwa air di titik pertama kurang bagus, tetapi juga membutuhkan kepastian bahwa titik pengganti nantinya benar-benar memiliki potensi air yang sesuai dengan kebutuhan irigasi.

Media masih menunggu penjelasan dari BBWS Citanduy/Satker yang menangani kegiatan JIAT mengenai nilai anggaran, pelaksana, target debit, hasil pengujian air, alasan perubahan lokasi serta progres pekerjaan secara keseluruhan.

Dengan adanya klarifikasi dari pelaksana bahwa air ditemukan tetapi kualitasnya dinilai kurang bagus dan lokasi sedang dicari untuk diganti, maka persoalan ini selanjutnya perlu diuji melalui data teknis dan administrasi pekerjaan.

Jangan sampai masyarakat hanya melihat mesin bor berpindah dari satu titik ke titik lain, tetapi tidak mengetahui apa dasar teknis perpindahan tersebut dan bagaimana target keberhasilan pekerjaan yang dibiayai anggaran negara.

(Asep sujana)

Mediasi Kasus Tanah Kapling di Karanggondang Berbuah Kesepakatan



PEKALONGAN, BN – Persoalan jual beli tanah kapling di Desa Karanggondang, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Pekalongan yang mandek sejak 2017 akhirnya menemukan titik terang. Melalui mediasi yang difasilitasi Desa Karanggondang, LSM Pejuang 24, warga pembeli dan Hartono,

Mantan Kepala Desa Karanggondang menyepakati komitmen penyelesaian.

Audiensi mediasi tersebut digelar di Balai Desa Karanggondang, Jumat (25/9/2026) pagi. Pertemuan ditengahi langsung oleh Kepala Desa Karanggondang aktif, Rudi Prawiro, setelah LSM Pejuang 24 menerima aduan dari warga.

Ketua LSM Pejuang 24, Teguh Hadi Santoso mengatakan, aduan tersebut masuk dari warga yang telah melakukan transaksi jual beli tanah kapling saat Hartono masih menjabat sebagai kepala desa, namun hingga kini belum ada kejelasan status tanah maupun sertifikat. “Alhamdulillah hari ini sudah disepakati komitmennya, kesanggupan dari mantan kepala desa, yang mana sudah pernah ada transaksi jual beli tanah pada tahun 2017 hingga sampai sekarang belum ada kejelasan,” kata Teguh usai audiensi.

Teguh menjelaskan, pihaknya menerima aduan dari 11 warga, namun total objek tanah yang dipermasalahkan mencapai 24 kapling, karena satu warga ada yang membeli lebih dari satu kapling. “Kemarin ada sekitar 11 warga yang mengadu kepada kami. Satu orang itu ada yang punya dua kapling. Jadi totalnya ada sekitar 24 kapling di situ,” ujarnya.

Dalam mediasi tersebut, lanjut Teguh, kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikan persoalan dalam jangka waktu 8 bulan ke depan. Kesepakatan itu dituangkan dalam surat pernyataan kesanggupan yang ditandatangani mantan kades. “Kesepakatannya sudah ada dari pihak warga dan Pak Hartono selaku mantan kepala desa. Disepakati untuk ada proses penyelesaian lebih lanjut, itu sekitar delapan bulan untuk kesanggupannya,” tegasnya.

Terkait nilai transaksi, Teguh menyebut bervariasi antara Rp 40 juta hingga Rp 50 juta per kapling. “Nominalnya bervariasi. Ada yang Rp 41 juta, ada yang Rp 50 juta, ada yang Rp 45 juta. Kita data semua ada di kita, valid,” ungkapny. Sementara itu, Kepala Desa Karanggondang, Rudi Prawiro mengapresiasi peran LSM Pejuang 24 yang telah menampung aspirasi warga dan menyelesaikan persoalan di tingkat desa. “Saya mengapresiasi luar biasa LSM Pejuang 24 karena sudah bisa menampung aspirasi warga, mengantarkan warga ke sini dan terselesaikan dengan baik di sini,” ujar Rudi.

Menurutnya, pertemuan ini menjadi bukti bahwa persoalan warga masih bisa diselesaikan secara musyawarah di balai desa tanpa harus menempuh jalur hukum terlebih dahulu. “Intinya bisa terselesaikan di Balai Desa, bisa ada titik temu dan sudah ada kesepakatan,” pungkasnya. (Dikin)

Jembatan Gantung Swadaya di Cibungur Jadi Akses Penting Petani



CILACAP, BN – Jembatan gantung yang dibangun secara swadaya oleh masyarakat di Dusun Cibungur, RT 04/RW 16, Desa Wanerja, Kecamatan Wanerja, Kabupaten Cilacap, kini menjadi akses penting bagi warga, terutama para petani yang hendak menuju lahan persawahan.

Jembatan tersebut dibangun atas dasar kebutuhan masyarakat terhadap akses penghubung menuju kawasan pertanian. Keberadaannya diharapkan dapat mempermudah aktivitas petani, baik saat membawa sarana produksi pertanian maupun mengangkut hasil panen.

Tokoh masyarakat setempat, Hadin, mengatakan pembangunan jembatan merupakan hasil gotong royong masyarakat karena akses tersebut sangat dibutuhkan warga. Menurut Hadin, meskipun jembatan telah selesai dibangun, masih diperlukan perhatian terhadap aspek keselamatan dan kekuatan konstruksinya. “Jembatan ini sangat dibutuhkan masyarakat, terutama para petani untuk menuju lahan persawahan. Karena dibangun secara swadaya, kami berharap ada perhatian untuk penguatan dan pengamanannya agar lebih aman ketika digunakan,” ujar Hadin.

Ketua LKRI Minta Ada Perhatian Teknis

Harapan serupa disampaikan Ketua LKRI setempat, Solihin Basri. Ia mengapresiasi inisiatif masyarakat yang bergotong royong membangun akses tersebut. Namun, Solihin berharap jembatan yang telah dibangun dapat ditinjau oleh pihak terkait, terutama dari sisi teknis dan keselamatan pengguna.

“Kami berharap pihak terkait bisa melihat langsung kondisi jembatan ini. Kalau masih ada bagian yang membutuhkan penguatan atau pengamanan, mudah-mudahan bisa diberikan arahan dan perhatian secara teknis,” kata Solihin Basri. Menurutnya, jembatan tersebut bukan sekadar sarana penghubung antar wilayah, tetapi juga memiliki fungsi penting dalam menunjang aktivitas pertanian masyarakat. Akses yang memadai akan membantu petani membawa pupuk, benih, peralatan pertanian, maupun hasil panen dari lahan persawahan menuju permukiman.

Perlu Evaluasi Kondisi Konstruksi

Secara teknis, penggunaan jembatan gantung secara rutin oleh masyarakat perlu diikuti dengan pemeriksaan terhadap sejumlah komponen konstruksi. Di antaranya kabel utama, kabel penggantung, titik angkur, tumpuan, lantai jembatan, sambungan, serta penguatan pada sisi kiri dan kanan jembatan. Pemeriksaan diperlukan untuk mengetahui kondisi aktual konstruksi dan memastikan jembatan sesuai dengan fungsi serta beban yang direncanakan. Usulan warga mengenai penambahan penguat maupun pengamanan juga idealnya didasarkan pada hasil pemeriksaan teknis di lapangan. Dengan demikian, tindakan yang dilakukan tidak hanya bersifat tambahan secara visual, tetapi benar-benar sesuai kebutuhan struktur.

Warga Berharap Akses Pertanian Semakin Aman

Masyarakat berharap pembangunan secara swadaya tersebut mendapat dukungan lanjutan dari pemerintah desa maupun instansi teknis terkait, terutama dalam aspek pembinaan, pemeriksaan dan pengamanan.

Warga tidak mempersoalkan siapa yang harus melakukan penguatan, tetapi berharap kondisi jembatan dapat dipastikan aman sebelum digunakan secara lebih luas dan intensif.

Bagi para petani Cibungur, keberadaan jembatan tersebut memiliki arti penting karena menyangkut kelancaran akses menuju lahan persawahan dan aktivitas pertanian sehari-hari.

Semangat gotong royong masyarakat telah menjadi langkah awal dalam menghadirkan akses tersebut. Kini, warga berharap aspek keselamatan dan kelayakan konstruksinya juga mendapat perhatian sehingga jembatan dapat memberikan manfaat dalam jangka panjang. (Asep sujana)

BBWS Citanduy Normalisasi Sungai Ciseel

CIAMIS, BN – Pelaksanaan normalisasi Sungai Ciseel di wilayah Sukanagara, Kecamatan Padaherang, Kabupaten Ciamis, yang dilaksanakan BBWS Citanduy melalui Satker SDA OP 2 dengan PPK Yahya, mendapat perhatian dan antusiasme dari kalangan petani di wilayah Maruyung dan Paledah.

Pantauan di lapangan, Selasa (22/9/2026), alat berat terlihat melakukan pengerukan dan penataan badan Sungai Ciseel sepanjang 1Km Pekerjaan tersebut tepatnya di dusun Sukasari desa Sukanegara kecamatan Padaherang kab Pangandaran, ini merupakan bagian dari upaya penanganan sungai untuk meningkatkan kapasitas aliran serta mengantisipasi potensi banjir dan genangan.

Bagi para petani di Maruyung dan Paledah, normalisasi tersebut dinilai penting karena kondisi sungai selama ini menjadi salah satu perhatian masyarakat, terutama ketika debit air meningkat.

Sejumlah masyarakat menduga kondisi Sungai Ciseel menjadi salah satu faktor yang turut berkontribusi terhadap genangan yang berdampak pada lahan pertanian. Namun, dugaan tersebut tetap memerlukan kajian teknis lebih lanjut karena genangan dan gangguan pertanian dapat dipengaruhi berbagai faktor, seperti curah hujan, sedimentasi, kapasitas sungai, kondisi



Pekerjaan Normalisasi Sungai Ciseel. (asep)

tanggul, elevasi lahan dan sistem drainase. Antusiasme petani terlihat karena mereka berharap normalisasi dapat meningkatkan kelancaran aliran air sehingga risiko genangan di kawasan pertanian dapat ditekan.

Sementara itu, PPK SDA OP 2 BBWS Citanduy, Yahya, mengimbau masyarakat agar bersamasama menjaga keamanan

dan kenyamanan selama pekerjaan berlangsung. “Kami mengimbau masyarakat untuk tetap menjaga keamanan, kenyamanan dan kondusivitas di sekitar lokasi pekerjaan. Mudah-mudahan pekerjaan dapat berjalan lancar dan memberikan manfaat bagi masyarakat,” ujar Yahya.

Masyarakat pun diharapkan ikut menjaga hasil pekerjaan setelah normalisasi selesai, termasuk tidak membuang sampah atau material lain ke badan sungai yang dapat kembali menghambat aliran. Para petani Maruyung dan Paledah berharap pekerjaan normalisasi Sungai Ciseel tidak hanya menyelesaikan persoalan aliran sungai dalam jangka pendek, tetapi juga diikuti pemeliharaan dan pengawasan secara berkelanjutan, sehingga fungsi sungai dapat tetap optimal dalam mendukung aktivitas pertanian sekaligus mengurangi risiko banjir.

(Asep sujana)

BBWS Citanduy Tangani Longsor Mulyadadi

CILACAP, BN – Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Citanduy melalui Satker SDA OP 2 melaksanakan program penanggulangan longsor di Desa Mulyadadi, Kecamatan Cipari, Kabupaten Cilacap.

Penanganan longsor tersebut dilakukan pada titik dengan panjang sekitar 16 meter, dengan konstruksi penanganan dibuat menjadi 6 trap atau teras bertingkat. Sistem bertingkat tersebut secara teknis dapat digunakan sebagai bagian dari upaya mengurangi kemiringan efektif lereng dan mengendalikan limpasan



Tatanan bronjong untuk mencegah longsor di Mulyadadi. (asep)

air permukaan, dengan efektivitasnya tetap bergantung pada desain, kondisi tanah, drainase, serta spesifikasi konstruksi yang diterapkan.

Di lapangan, pekerjaan diawasi oleh Erik yang bersinergi dengan pelaksana lapangan Haji Tato Wardo. Pelaksanaan pekerjaan mengikuti arahan dan instruksi dari PPK Satker SDA OP 2 BBWS

Citanduy, Haji Yahya.

Koordinasi antara pengawas dan pelaksana menjadi

Peringati Harhubnas 2026, Gubernur Khofifah Gratiskan Trans Jatim dan Ajak Warga Beralih ke Transportasi Publik

SURABAYA, BN – Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menggratiskan tarif layanan Trans Jatim selama satu hari, Kamis (17/9), dalam rangka memperingati Hari Perhubungan Nasional (Harhubnas) Tahun 2026.

TARIF gratis berlaku pada seluruh layanan Trans Jatim di Koridor Gerbang-kertasusila 1-7 dan Koridor 1 Malang Raya. Program ini tidak berlaku untuk layanan Trans Jatim Luxury.

Gubernur Khofifah mengatakan, tarif gratis tersebut merupakan bentuk apresiasi Pemprov Jatim kepada masyarakat sekaligus ajakan untuk mencoba dan membiasakan diri menggunakan transportasi publik.

Program ini juga menjadi implementasi tema Harhubnas 2026, “Menghubungkan Indonesia untuk Masa Depan yang Lebih Maju”.

“Di peringatan Hari Perhubungan Nasional, kami mengajak masyarakat menikmati layanan Trans Jatim secara gratis. Silakan manfaatkan kesempatan ini untuk bepergian menggunakan transportasi publik yang aman, nyaman, dan terjangkau,” kata Khofifah di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Kamis (17/9).

Gubernur Khofifah menegaskan, kebijakan tarif gratis tidak hanya menjadi bagian dari perayaan Harhubnas. Program tersebut juga menjadi upaya memperkenalkan manfaat angkutan umum massal kepada lebih banyak masyarakat.

Menurutnya, pengalaman menggunakan Trans Jatim diharapkan dapat menumbuhkan kepercayaan

sekaligus mendorong perubahan kebiasaan masyarakat dari penggunaan kendaraan pribadi menuju transportasi publik.

“Program ini bukan sekadar memberikan perjalanan gratis. Kami ingin semakin banyak masyarakat mengenal, mencoba, dan pada akhirnya menjadikan angkutan umum sebagai pilihan utama dalam menjalankan aktivitas sehari-hari,” tuturnya.

Khofifah menjelaskan, meningkatnya penggunaan transportasi publik akan memberikan manfaat bagi masyarakat dan lingkungan. Berkurangnya penggunaan kendaraan pribadi dapat membantu menekan kemacetan dan polusi udara serta meningkatkan efisiensi mobilitas masyarakat.

“Beralih ke transportasi publik berarti turut berkontribusi dalam menyelesaikan masalah bersama. Satu bus Trans Jatim bisa mengurangi puluhan kendaraan pribadi di jalan,” tegasnya.

Penggunaan angkutan umum massal juga menjadi salah satu upaya mengurangi risiko kecelakaan lalu lintas yang dipengaruhi tingginya mobilitas kendaraan pribadi di jalan raya.

“Semakin banyak masyarakat menggunakan transportasi publik, semakin besar peluang kita untuk mengurangi kemacetan, menekan polusi udara, dan membangun mobilitas yang lebih aman,” jelasnya.

Lebih lanjut, Khofifah mengatakan bahwa penyelenggaraan transportasi publik memiliki peran penting dalam memperkuat konektivitas antarwilayah di Jawa Timur.

Keberadaan Trans Jatim yang menghubungkan berbagai kawasan di wilayah Gerbangkertasusila dan

Malang Raya mendukung mobilitas masyarakat menuju pusat pendidikan, perkantoran, perdagangan, pelayanan publik, serta pusat pertumbuhan ekonomi.

“Transportasi publik menghubungkan masyarakat dengan berbagai peluang. Melalui layanan yang terintegrasi, akses menuju sekolah, kampus, tempat kerja, pusat ekonomi, dan pelayanan publik menjadi semakin mudah,” ujarnya.

Hal tersebut sejalan dengan tema Harhubnas 2026 yang menempatkan konektivitas sebagai fondasi untuk mewujudkan masa depan Indonesia yang lebih maju.

Khofifah menuturkan, makna menghubungkan Indonesia tidak hanya berkaitan dengan pembangunan infrastruktur. Konektivitas harus mampu membuka akses, memperlancar mobilitas, dan memperkecil kesenjangan antardaerah.

“Transportasi menghubungkan wilayah sekaligus menghubungkan masyarakat dengan kesempatan untuk tumbuh. Karena itu, layanan transportasi harus terus dikembangkan agar semakin mudah diakses, terintegrasi, dan menjangkau lebih banyak masyarakat,” tegasnya.

Pemprov Jatim terus mengembangkan sistem transportasi publik yang berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan dan kebutuhan mobilitas masyarakat. Pengembangan tersebut dilakukan dengan memperkuat konektivitas antar kawasan serta keterhubungan dengan moda transportasi lainnya.

Oleh sebab itu, Pemprov Jatim terus memperkuat integrasi layanan dan koneksi antar moda. Namun, Khofifah mengingatkan, layanan terbaik tidak akan berkelanjutan tanpa partisipasi masyarakat.

“Pemerintah terus memperkuat layanan. Kini giliran masyarakat mendukungnya dengan membangun budaya naik angkutan umum. Keberlanjutan transportasi publik ada di tangan kita bersama,” ajaknya.

Di sisi lain, Khofifah menekankan bahwa pengembangan sarana dan jaringan layanan harus diikuti dengan budaya menggunakan transportasi publik. Partisipasi masyarakat menjadi faktor penting dalam membangun sistem angkutan umum yang berkelanjutan.

“Pemerintah terus memperkuat layanan, tetapi keberlanjutan transportasi publik juga membutuhkan dukungan masyarakat. Mari bersama-sama membangun budaya menggunakan angkutan umum,” ajaknya.

Khofifah juga mengimbau masyarakat yang memanfaatkan layanan gratis tersebut untuk menjaga ketertiban, kebersihan, dan fasilitas Trans Jatim. Para penumpang diminta mengikuti arahan petugas serta memberikan prioritas kepada lanjut usia, ibu hamil, penyandang disabilitas, dan penumpang yang membawa anak.

“Silakan manfaatkan layanan gratis ini dengan tertib dan tetap menjaga kenyamanan bersama. Trans Jatim adalah fasilitas publik



yang harus kita rawat bersama,” pesannya.

Pada peringatan Harhubnas 2026, Khofifah turut menyampaikan apresiasi kepada seluruh insan perhubungan yang telah bekerja menjaga konektivitas serta kelancaran mobilitas masyarakat di Jawa Timur.

“Selamat Hari Perhubungan Nasional Tahun 2026. Terima kasih kepada seluruh insan perhubungan yang telah mengabdikan diri menjaga masyarakat tetap terhubung,” ucapnya.

“Semoga layanan gratis Trans Jatim ini semakin mendekatkan masyarakat dengan transportasi publik. Mari kita kuatkan konektivitas dan bersama-sama menghubungkan Indonesia untuk masa depan yang lebih maju,” pungkasnya. (dji/adv)

Pendampingan Pengurusan Dokumen Usaha Perikanan Tangkap di Kabupaten Pasuruan



Kegiatan Pendampingan Pengurusan Dokumen Usaha Perikanan Tangkap di Instalasi Pelabuhan Perikanan Pantai (IPPP) Lekok, Kabupaten Pasuruan, oleh Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Malang. (ist)

Tambakan, dan Jatirejo, Kabupaten Pasuruan. Kegiatan dilaksanakan dalam bentuk pendampingan, pemberian arahan, serta penyampaian informasi mengenai persyaratan dan tata cara pengurusan dokumen kapal perikanan.

Pendampingan ini bertujuan untuk membantu para nelayan dalam memahami dan memenuhi persyaratan administrasi usaha perikanan tangkap. Melalui kegiatan tersebut, nelayan juga mendapatkan informasi mengenai tahapan pengurusan dokumen kapal sehingga proses perizinan dapat dilakukan secara lebih tertib dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Penyerahan E-BKP kepada Nelayan

Selain memberikan pendampingan, kegiatan juga dirangkaikan dengan penyerahan Buku Kapal Perikanan Elektronik (E-BKP) kepada nelayan yang telah menyelesaikan proses pengurusan dokumen kapal secara tertib. Pada kegiatan ini, sebanyak 64 dokumen E-BKP diserahkan kepada para nelayan.

E-BKP menjadi salah satu dokumen penting yang memberikan identitas dan legalitas terhadap kapal perikanan. Dengan memiliki dokumen kapal yang lengkap, nelayan memperoleh kepastian administrasi sehingga dapat melaksanakan kegiatan penangkapan ikan secara lebih aman, tertib, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dukungan Percepatan Legalitas Nelayan

Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Malang mengapresiasi dan menyampaikan terima kasih kepada para nelayan yang telah menyelesaikan pengurusan dokumen E-BKP dengan tertib. Kepatuhan dalam melengkapi dokumen kapal merupakan bagian penting dalam mewujudkan kegiatan usaha perikanan tangkap yang legal dan teradministrasi dengan baik.

Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Malang juga menyatakan dukungan penuh terhadap percepatan pengurusan dokumen kapal perikanan di wilayah Kabupaten Pasuruan. Pendampingan akan terus dilakukan sebagai upaya membantu nelayan dalam memenuhi persyaratan administrasi serta mempercepat proses legalitas usaha.

Mewujudkan Usaha Perikanan yang Tertib dan Berkelanjutan

Melalui kegiatan pendampingan dan fasilitasi ini, diharapkan pemahaman nelayan terhadap pentingnya dokumen usaha perikanan semakin meningkat. Kelengkapan dokumen juga diharapkan dapat memberikan kepastian dalam menjalankan kegiatan penangkapan ikan serta mendukung terciptanya usaha perikanan tangkap yang tertib, aman, legal, dan berkelanjutan. (dkp,adv)

PASURUAN, BN – Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Malang melaksanakan kegiatan Pendampingan Pengurusan Dokumen Usaha Perikanan Tangkap di Instalasi Pelabuhan Perikanan Pantai (IPPP) Lekok, Kabupaten Pasuruan, Senin, 31 Agustus 2026.

Rincian Kegiatan

Kegiatan diikuti oleh 30 orang nelayan yang berasal dari wilayah Wates, Pasir Panjang,

Jatim Raih Terbaik I Indonesia Halal Industry Awards 2026



SURABAYA, BN – Pemerintah Provinsi Jawa Timur meraih Terbaik I Indonesia Halal Industry Awards (IHYA) 2026 kategori Lembaga Pemerintahan, subkategori Pemerintah Daerah Provinsi yang Memberikan Dukungan Program Halal Terbaik.

Penghargaan yang diselenggarakan Kementerian Perindustrian Republik Indonesia tersebut diterima Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur Dydik Rudi Prasetya yang hadir

mewakili Gubernur Khofifah dalam penganugerahan IHYA 2026 di Jakarta, Kamis (24/9).

Gubernur Khofifah mengatakan, capaian ini merupakan hasil kerja bersama dalam membangun ekosistem industri halal Jawa Timur yang semakin terintegrasi, mulai dari sertifikasi, pendampingan, peningkatan kualitas produk, penguatan kapasitas pelaku usaha, hingga perluasan akses pasar.

“Alhamdulillah, penghargaan ini menjadi apresiasi atas ikhtiar dan kolaborasi seluruh pihak dalam memperkuat ekosistem industri halal di Jawa Timur. Capaian ini bukan hanya milik Pemprov Jatim, tetapi juga pemerintah kabupaten dan kota, pelaku usaha, perguruan tinggi, lembaga pendamping, komunitas, serta seluruh masyarakat Jawa Timur,” ujarnya di Surabaya, Jumat (25/9).

Khofifah menegaskan, penghargaan tersebut bukanlah tujuan akhir. Capaian ini justru menjadi pemacu untuk semakin memperluas pendampingan, meningkatkan kualitas produk, serta membuka akses pasar bagi Industri Kecil dan Menengah (IKM) maupun Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). “Penghargaan ini harus menjadi energi untuk bekerja semakin keras. Ekosistem halal harus memberikan manfaat nyata berupa peningkatan daya saing, perluasan pasar, pertumbuhan usaha, dan kesejahteraan masyarakat,” tegasnya.

Salah satu capaian penguatan ekosistem halal di Jawa Timur terlihat dari tingginya jumlah sertifikasi halal. Hingga Agustus 2026, tercatat sebanyak 703.853 sertifikat halal telah diterbitkan dan mencakup sekitar 1,8 juta produk. Khofifah pun menekankan, capaian tersebut menunjukkan semakin meningkatnya kesadaran sekaligus kesiapan pelaku usaha Jawa Timur dalam memenuhi standar produk halal.

“Jumlah tersebut merupakan modal besar bagi produk-produk Jawa Timur untuk meningkatkan kepercayaan konsumen serta bersaing di pasar domestik maupun internasional,” ungkapnya.

Lebih lanjut, Khofifah menjelaskan, sertifikasi halal tidak hanya berkaitan dengan pemenuhan aspek keagamaan. Di dalamnya juga terdapat jaminan mengenai kualitas, kebersihan, keamanan, ketertelusuran, dan konsistensi proses produksi. Maka dari itu, sertifikasi halal harus ditempatkan sebagai instrumen untuk meningkatkan nilai tambah sekaligus memperkuat kepercayaan konsumen terhadap produk Jawa Timur.

“Halal harus menjadi bagian dari budaya mutu. Produk tidak hanya dipastikan halal, tetapi juga harus berkualitas, inovatif, aman, produktif, serta memiliki kemasan dan pemasaran yang mampu menjawab kebutuhan konsumen,” jelasnya.

Penguatan ekosistem halal Jawa Timur juga ditopang keberadaan 92 Lembaga Pendamping Proses Produk Halal (LP3H) dan 14 Lembaga Pemeriksa Halal (LPH).

Selain itu, terdapat 660 rumah potong hewan yang telah bersertifikat halal serta tiga lembaga pelatihan sumber daya manusia halal, yakni Techno Sains Academy, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dan Universitas Trunojoyo Madura.

“Keberadaan lembaga pendamping, pemeriksa halal, rumah potong hewan bersertifikat halal, serta lembaga pelatihan SDM menjadi bagian penting dalam membangun ekosistem halal yang utuh dari hulu hingga hilir,” tutur Khofifah.

Pemprov Jatim juga terus menjalankan berbagai program strategis, mulai dari fasilitasi sertifikasi halal, pelatihan penyelia halal, pendampingan peningkatan mutu dan standarisasi produk, hingga promosi produk unggulan Jawa Timur.

Salah satu upaya mempertemukan berbagai pemangku kepentingan diwujudkan melalui penyelenggaraan East Java Halal Industry Festival. Forum tersebut menjadi ruang koordinasi dan kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, perguruan tinggi, lembaga pendamping, komunitas, dan pelaku industri halal. (dji)

DPRD Gelar Rapat Paripurna HUT Ke-35 Lampung Barat

❑ Usung Semangat Setawitan, Seuyunan, Sehangguman, Maju Jejama



Suasana rapat paripurna DPRD Kabupaten Lampung Barat dengan agenda peringatan HUT Kabupaten Lampung Barat ke 35 tahun. (ist)

LAMPUNG BARAT, BN – DPRD Kabupaten Lampung Barat menggelar Rapat Paripurna dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-35 Kabupaten Lampung Barat di Ruang Sidang Makhgasana DPRD Kabupaten Lampung Barat, Rabu 23/9/2026.

KEGIATAN tersebut mengusung tema “Setawitan, Seuyunan, Sehangguman, Maju Jejama” yang mencerminkan semangat ke-

bersamaan dan persatuan dalam mendorong kemajuan daerah.

Rapat paripurna tersebut menjadi bagian dari rangkaian peringatan hari jadi Kabupaten Lampung Barat, dengan agenda mendengarkan pidato Bupati Lampung Barat dalam rangka HUT ke-35 Kabupaten Lampung Barat. Momentum ini menjadi kesempatan untuk memperkuat semangat kebersamaan antara pemerintah daerah, DPRD dan seluruh elemen masyarakat dalam melanjutkan pembangunan daerah.

Selain pelaksanaan rapat paripurna,

rangkaian kegiatan peringatan HUT Kabupaten Lampung Barat juga diisi dengan penanaman pohon bersama sebagai bentuk kepedulian terhadap kelestarian lingkungan. Kegiatan tersebut sejalan dengan komitmen Lampung Barat sebagai Kabupaten Konservasi serta upaya menjaga keberlanjutan alam bagi generasi mendatang.

Tema “Setawitan, Seuyunan, Sehangguman, Maju Jejama” menjadi pengingat pentingnya membangun daerah melalui persatuan, kebersamaan dan semangat gotong royong. Dengan sinergi seluruh

pihak, pembangunan di Kabupaten Lampung Barat diharapkan dapat terus berjalan secara berkelanjutan dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

DPRD Kabupaten Lampung Barat berharap peringatan HUT ke-35 ini dapat menjadi momentum untuk memperkuat kolaborasi dalam menjaga lingkungan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mewujudkan pembangunan daerah yang lebih maju, dengan tetap berlandaskan nilai-nilai kebersamaan.

(ADV/ TAUFIK).



bappenda
JUARA

Badan Pengkajian Pendapatan Daerah
Kabupaten Bogor

IKM Bappenda Kabupaten Bogor

Capai 86,24

Mutu Pelayanan A, Kinerja Unit Pelayanan Sangat Baik

Hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) menunjukkan bahwa masyarakat memberikan penilaian positif terhadap pelayanan perpajakan daerah yang diselenggarakan oleh Bappenda Kabupaten Bogor.

Jenis Layanan yang Dinilai

Responden menilai dari berbagai layanan perpajakan daerah dengan rincian sebagai berikut:

Layanan	Jumlah Responden	Nilai Rata-rata
Pelayanan Initiasi SP478	5 responden	0,11%
Pelayanan Pendaftaran SP/PP PBB-2	23 responden	0,5,10%
Pelayanan Penilaian Objek Pajak Daerah	11 responden	0,20%
Pelayanan Mutasi Sektoral dan Mutasi Habis PBB-7	35 responden	0,3,12%
Pelayanan Peninjauan Objek Pajak	36 responden	0,4,8%
Pelayanan Refraksi SP/PP	40 responden	0,5,47%

Uraian Peningkatan Pelayanan

Bappenda Kabupaten Bogor terus berinovasi dan berkolaborasi untuk meningkatkan pelayanan yang lebih baik melalui:

- Pengembangan sistem informasi** agar lebih mudah diakses oleh user.
- Peningkatan kualitas layanan** melalui pelatihan dan peningkatan kompetensi pegawai.
- Peningkatan pelayanan berbasis teknologi** dengan memanfaatkan media digital.
- Peningkatan kemampuan pegawai** melalui pelatihan dan peningkatan kompetensi.
- Evaluasi keterlaksanaan** program layanan untuk lebih perbaikan layanan.

Apa Artinya?

Nilai IKM 86,24 menunjukkan bahwa masyarakat menilai pelayanan Bappenda Kabupaten Bogor sudah sangat baik, baik dari sisi kemudahan, kecepatan, keadilan informasi, hingga responsibilitas pelayanan.

Pemilihan Masyarakat Mencakup

- Kemudahan akses pelayanan
- Kemudahan pengurusan informasi
- Kemudahan pelayanan informasi
- Kemudahan dari profesionalitas pelayanan
- Kemudahan akses dan prosedur
- Penggunaan teknologi informasi

Melalui data yang terdapat

Melalui evaluasi/audit telah menunjukkan bahwa pelayanan kami

Melaju Pelayanan yang Lebih Berkualitas

Capaian IKM 86,24 menjadi motivasi bagi seluruh jajaran Bappenda Kabupaten Bogor untuk lebih meningkatkan kualitas pelayanan dan meningkatkan kepercayaan masyarakat.

Pelayanan yang lebih baik akan terus dikembangkan untuk meningkatkan kualitas layanan, meningkatkan kinerja pegawai, dan meningkatkan kepercayaan masyarakat.

Bappenda JUARA

Media Penerimaan | Jasa Pemeliharaan | Jasa Pengawasan | Jasa Pengawasan | Jasa Pengawasan

Bappenda Kabupaten Bogor | Bappenda Kabupaten Bogor

(IKM) Semester I Tahun 2026 sebesar 86,24% dengan predikat Sangat Baik. Capaian tersebut diperoleh berdasarkan hasil Survei Kepuasan Masyarakat yang melibatkan 150 responden. Survei mencakup enam jenis layanan yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat, antara lain:

- (1). Pelayanan Validasi BPHTB, sebanyak 5

in 2026 sebesar 86,24%
angat Baik. Capaian
dasarkan hasil Survei
t yang melibatkan 150
mencakup enam jenis
uhan langsung dengan
rakat, antara lain:
si BPHTB, sebanyak 5

Capaian IKM tersebut menjadi salah satu gambaran atas komitmen BAPPENDA Kabupaten Bogor dalam menghadirkan pelayanan publik yang berkualitas, responsif, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Tingkat kepuasan masyarakat menjadi salah satu indikator penting untuk melihat sejauh mana pelayanan yang diberikan telah memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat. Bagi BAPPENDA Kabupaten Bogor, pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat bukan sekedar upaya untuk memperoleh nilai atau predikat. Setiap penilaian, saran, dan masukan yang disampaikan masyarakat merupakan informasi penting dalam mengevaluasi kualitas pelayanan, mempertahankan aspek yang telah berjalan dengan baik, sekaligus mengidentifikasi bagian-bagian yang masih memerlukan penyempurnaan.

Ke depan, BAPPENDA Kabupaten Bogor berkomitmen untuk terus memperkuat kualitas pelayanan publik melalui peningkatan profesionalisme aparatur, optimalisasi proses pelayanan, pemanfaatan teknologi, serta penguatan budaya kerja yang berorientasi pada kepuasan masyarakat. BAPPENDA Kabupaten Bogor-Melayani Masyarakat dengan JUJUR, AMANAH, dan RAMAH demi Mendukung Pembangunan Kabupaten Bogor.

(eml)

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bogor mempunyai tugas: A (1) Menetapkan pedoman dan pengarahannya terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi, serta rekonstruksi secara adil dan setara; (2) Menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan; (3) Menyusun, menetapkan dan menginformasikan peta rawan bencana; (4) Menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana; (5) Melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada bupati setiap bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana; (6) Mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang, barang dan bantuan lainnya; (7).Mempertanggungjawabkan

Indikator kinerja bisa dimaknai sebagai alat yang digunakan untuk mengukur pencapaian suatu target, baik dengan menggunakan uku-

III. Program Kegiatan BPBD Tahun 2026. Pada tahun 2026 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bogor mempunyai 2 program dan 12 Kegiatan yang terdiri dari 1 Program utama dan 1 Program pendukung, Program Utama Badan Penang-

*Kegiatan Penyusunan laporan capaian Kinerja dan

*Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana

Demikian Publikasi Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2026 ini dibuat dengan harapan dapat memberikan gambaran tentang berbagai capaian kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bogor dalam rangka pencapaian tahapan Visi dan Misi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bogor dan Pemerintah Kabupaten Bogor pada umumnya. (Adv)

Masyarakat Kab Bogor Satukan Suara, Tolak Korupsi Target 1 Juta Tanda Tangan Petisi

BOGOR, BN-Masyarakat sipil Kabupaten Bogor satukan suara untuk mendesak pengusutan tuntas dugaan praktik korupsi melalui petisi anti korupsi dengan mengumpulkan menargetkan 1 juta tanda tangan di spanduk.

Gerakan petisi anti korupsi merupakan aspirasi masyarakat untuk mendorong penegak hukum untuk menciptakan pemerintahan yang bersih, transparan dan bebas dari segala bentuk praktik korupsi.

Riswan Riswanto mengatakan kepada segenap wartawan, mengajak masyarakat Kab Bogor agar ikut membubuhi tanda tangan petisi, ini adalah merupakan salah satu aspirasi mendesak para penegak hukum agar mengusut tuntas perkara dugaan praktik pemotongan upah pungut di lingkungan Kab Bogor dan usut tuntas dugaan praktik korupsi.

“Kepada seluruh masyarakat Kab Bogor agar



menyatukan suara melalui petisi, tolak segala praktik korupsi di Kabupaten Bogor, diantaranya kasus dugaan upah pungut di Kabupaten Bogor,” ajak Riswan

Lanjut Riswan, setiap warga masyarakat Kab Bogor yang ikut membubuhi tanda tangan adalah merupakan simbol dukungan terhadap memberantas korupsi, serta mendorong kepada penegak hukum agar diproses agar dilakukan secara transparan.

Masih menurut Riswan, masyarakat Kab Bogor akan terus mengawal dugaan beberapa kasus korupsi di Kab Bogor, pengumpulan petisi akan dilakukan dengan dua tahap, tahap pertama dilakukan pada Senin, (21/9/2026) di Padepokan Padakamy, Kel Tengah, Kec Cibinong, sedangkan tahap kedua akan dilakukan pada Jum’at (25/9/2026) akan membenteng petisi di depan Kantor DPRD Kab Bogor. (eml)

Wabup Sidrap Nurkanaah Ajak Guru Terus Kembangkan Kompetensi Lewat Workshop Pendidikan



Wabup Sidrap, Nurkanaah. (ist)

SIDRAP, BN - Wakil Bupati Sidenreng Rappang (Sidrap),Nurkanaah, mengajak para guru terus mengembangkan kompetensi dan profesionalisme dalam menjalankan tugas sebagai pendidik.

Hal itu disampaikan Nurkanaah saat menghadiri Workshop Pendidikan yang diselenggarakan Direktorat Sekolah Dasar, Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Nonformal dan Informal bersama Komisi X DPR RI di Ball-

room Al-Ghoni Hotel Grand Sidney, Pangkajene, Kec Maritengngae, Ahad (27/9/2026).

Workshop tersebut diikuti 100 guru dari perwakilan setiap kecamatan se-Kabupaten Sidrap. Hadir dalam kegiatan tersebut Anggota DPR RI Muslimin Bando, Widya Prada Ahli Utama Direktorat Sekolah Dasar Abdul Halim Muharram, Plt. Kepala Dinas Pendidikan Sirajuddin, Kepala Dinas Porapar Muhammad Aries Yasin, Wakil Rektor UMS Rappang M. Rais

Rahmat Razak, serta undangan lainnya.

Anggota DPR RI Muslimin Bando saat membuka acara menekankan pentingnya menjadikan pendidikan sebagai prioritas utama serta meningkatkan kualitas pendidikan melalui penguatan kompetensi para pendidik.

Ia berharap para guru memanfaatkan workshop tersebut untuk menambah wawasan dan meningkatkan kemampuan dalam menjalankan tugas sebagai tenaga pendidik.

Sementara itu, Nurkanaah yang juga menjabat Ketua PGRI Kabupaten Sidrap menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah menyelenggarakan workshop tersebut.

Ia berharap guru yang mengikuti workshop dapat membagikan pengetahuan yang diperoleh kepada rekan-rekan pendidik lainnya yang belum mendapat kesempatan

mengikuti pelatihan serupa. “Saya sangat berharap teman-teman yang diundang hari ini dapat mewakili teman-teman yang belum mendapat kesempatan mengikuti pelatihan seperti ini,” ujarnya.

Menurutnya, pengembangan kompetensi penting untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia di bidang pendidikan sekaligus mendorong guru terus mengembangkan kemampuan dan profesionalismenya.

Workshop dilanjutkan dengan pemaparan materi dari sejumlah narasumber, yakni Wakil Rektor UMS Rappang M. Rais Rahmat Razak, Wakil Bupati Sidrap Nurkanaah, serta perwakilan Kementerian Pendidikan. Kegiatan tersebut juga dirangkaikan dengan pemberian cenderamata kepada para narasumber sebagai bentuk apresiasi atas kontribusi dan materi yang disampaikan. (syabir)

Bupati Sidrap Kukuhkan Pengurus Karang Taruna Periode 2026–2031

SIDRAP, BN - Pengurus Karang Taruna kecamatan se-Kabupaten Sidenreng Rappang (Sidrap) periode 2026–2031 resmi dikukuhkan di Aula Saromase, Kompleks SKPD Sidrap, Senin (28/9/2026).

Pengukuhan dilakukan langsung oleh Bupati Sidrap Syaharuddin Alrif. Momen ini menjadi bagian dari upaya memperkuat gerakan sosial kemasyarakatan dan memperluas kolaborasi pembangunan di Kabupaten Sidrap.

Turut hadir Wakil Bupati Nurkanaah, Ketua DPRD Takyuddin Masse, Sekretaris Daerah Andi Rahmat Saleh, perwakilan Forkopimda, pimpinan instansi vertikal, para kepala organisasi perangkat daerah (OPD), serta seluruh camat se-Kabupaten Sidrap.

Ketua Karang Taruna Kabupaten Sidrap, Abdul Jabbar, berharap pengurus yang baru dikukuhkan tidak sekadar menjalankan organisasi secara administratif, tetapi juga mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Ia menegaskan, Karang Taruna akan memperkuat gerakan sosial kemasyarakatan, termasuk mengambil peran dalam penanggulangan kemiskinan. “Karang Taruna harus berguna bagi masyarakat. Kita akan memperkuat gerakan sosial kemasyarakatan dan terlibat dalam penanggulangan kemiskinan,” ujar Abdul Jabbar.

Menurutnya, Karang Taruna juga siap bersinergi dengan pemerintah daerah dalam menjalankan program pembangunan. “Karang Taruna siap berkolaborasi dan mendukung visi dan misi pemerintah



Bupati Sidrap Syaharuddin Alrif saat mengukuhkan Pengurus Karang Taruna Periode 2026–2031. (ist)

daerah, termasuk 14 program pemerintah,” lanjutnya.

Sementara itu, Bupati Sidrap Syaharuddin Alrif menekankan bahwa keberhasilan suatu daerah tidak semata-mata diukur dari pembangunan fisik dan infrastruktur.

Menurut Syaharuddin, sebagaimana disampaikan Menteri Dalam Negeri, keberhasilan daerah dapat dilihat dari sejumlah indikator yang bersentuhan langsung dengan kesejahteraan masyarakat.

“Keberhasilan suatu daerah bukan hanya dilihat dari pembangunan daerah. Menurut Menteri Dalam Negeri, ukuran keberhasilan daerah adalah bagaimana mengup-

bah ekonomi, menekan kemiskinan, mengurangi pengangguran, meningkatkan pendidikan dan kesehatan, menangani stunting, serta mengendalikan inflasi,” kata Syaharuddin.

Ia menilai indikator tersebut menjadi bagian penting dalam mengukur kemajuan Kabupaten Sidrap.

Syaharuddin juga menyebut berbagai capaian Sidrap hingga meraih sejumlah penghargaan merupakan hasil kerja bersama dalam meningkatkan kinerja daerah. Prestasi tersebut tidak hanya menjadi pengakuan atas capaian pemerintah daerah, tetapi juga berdampak pada peningkatan pemasukan dan kapasitas daerah.

“Inilah yang mengubah Sidrap menjadi daerah yang berprestasi, dengan berbagai penghargaan yang diraih, sekaligus menambah pemasukan daerah melalui prestasi-prestasi tersebut,” ujarnya. (syabir/ hans)

Sudirman Bungi, Turun Pantau Distribusi Air Saluran Skunder Suppa



Wakil Bupati Pinrang Sudirman Bungi, S.I.P., M.Si. (ist)

PINRANG, BN - Wakil Bupati Pinrang Sudirman Bungi, S.I.P., M.Si., didampingi Kepala Dinas Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi (SDABK) Bachrumsyah turun langsung memantau distribusi air pada Saluran Sekunder Suppa yang berada di Kampung Bila, Desa Pananrang, Kecamatan Mattiro Bulu, Kamis (25/9/2026).

Pemantauan ini dilakukan untuk memastikan pengaturan dan distribusi air pada Saluran Sekunder Suppa ruas 5, 6 dan 7 dapat berjalan dengan baik, khususnya di tengah keterbatasan pasokan air akibat kondisi musim kemarau.

Wabup Sudirman mengungkapkan bahwa pengaturan distribusi air perlu dilakukan secara bersama dan terkoordinasi agar setiap wilayah mendapatkan

pasokan sesuai kebutuhan.

Menurutnya, pengaturan yang baik diharapkan dapat memberikan kesempatan yang lebih merata kepada para petani dalam memperoleh air irigasi, sehingga kebutuhan tanaman tetap dapat terpenuhi dan produktivitas pertanian masyarakat dapat dipertahankan.

“Yang paling penting adalah bagaimana air yang tersedia dapat dibagi secara adil sehingga seluruh petani memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan pasokan air,” ungkap Wabup Sudirman.

Dalam pemantauan tersebut turut hadir Kepala Desa Pananrang, Kepala UPTD Alitta Carawali, Babinsa, Bhabinkamtibmas, kelompok tani serta petugas operasi dan pemeliharaan (OP).

Koordinasi lintas pihak ini diharapkan mampu mencegah terjadinya persoalan dalam pembagian air sekaligus menjaga hubungan baik antar petani, sehingga distribusi air dapat berjalan tertib dan memberikan manfaat bagi keberlangsungan usaha pertanian masyarakat. (*syabir/hans).

Wakil Bupati Asahan Ajak Masyarakat Gemar Makan Ikan untuk Cegah Stunting



ASAHAN, BN - Wakil Bupati Asahan, Rianto, S.H., M.A.P., menghadiri kegiatan Sosialisasi Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan (Gemarikan) di Desa SipakuArea, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Asahan Kamis (10/09/2026) kemarin.

Kegiatan tersebut mengusung tema “Agar Tubuh Sehat,Kuat dan Cerdas untuk Mewujudkan Indonesia Emas Tahun 2045.” Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Asahan,Umar,S.P.,M.M.,dalam laporannya mengatakan,kegiatan Gemarikan tersebut juga dikolaborasikan dengan sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD), di antaranya Dinas Kesehatan dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Asahan.

Kolaborasi itu salah satunya diwujudkan melalui peninjauan perekaman KTP elektronik (KTP-el) bagi anak dan remaja yang memasuki usia 17 tahun.

Menurutnya,kegiatan ini juga bertujuan mendorong masyarakat,khususnya ibu hamil,ibu menyusui, calon pengantin serta keluarga yang memiliki anak, untuk membiasakan konsumsi ikan sebagai bagian dari pola makan sehat dan bergizi.

Hal tersebut diharapkan dapat mendukung upaya pencegahan stunting serta mewujudkan generasi yang sehat, kuat dan cerdas menuju Indonesia Emas 2045.

Peserta kegiatan terdiri dari 35 anak PAUD yang mengikuti lomba mewarnai. Selain itu, terdapat 30 peserta lainnya yang terdiri dari calon pengantin,ibu hamil,ibu menyusui, kader Posyandu,TPPKK Desa Sipaku Area, serta tokoh agama, tokoh pemuda dan tokoh masyarakat. Sementara itu, Bupati Asahan dalam sambutannya yang disampaikan oleh Wakil Bupati mengatakan Kabupaten Asahan merupakan daerah yang kaya akan sumber daya alam, salah satunya sektor perikanan.

Menurutnya, ikan merupakan salah satu sumber protein hewani yang sangat baik bagi tubuh.Ikan selain kaya akan protein, juga mengandung omega-3, vitamin dan mineral yang sangat penting bagi pertumbuhan dan perkembangan tubuh

Mengonsumsi ikan secara rutin dapat memberikan berbagai manfaat bagi kesehatan,diantaranya membantu meningkatkan kecerdasan anak, menjaga kesehatan jantung dan otak, serta menjadi salah satu upaya dalam mencegah stunting. Pentingnya pemenuhan gizi sejak masa kehamilan hingga anak berusia dua tahun atau yang dikenal sebagai periode 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK).

“Untuk tumbuh sehat dan cerdas, salah satunya adalah dengan memastikan asupan gizi yang baik sejak masa kehamilan hingga anak berusia dua tahun. Kegiatan Gemarikan menjadi salah satu upaya untuk mensosialisasikan pentingnya konsumsi ikan sekaligus mendorong masyarakat menjadikan ikan sebagai salah satu menu utama dalam keluarga,” ucapnya.

Melalui kegiatan tersebut, Pemerintah Kabupaten Asahan mengajak masyarakat untuk bersama-sama membudayakan konsumsi ikan sebagai bagian dari pola hidup sehat sekaligus mendukung upaya pencegahan stunting dan mewujudkan generasi yang sehat, kuat dan cerdas menuju Indonesia Emas tahun 2045. (TP)

Puluhan Siswa MTsN2 Kisaran Diduga Keracunan MBG, Dilarikan ke Rumah Sakit



Korban saat dirawat di rumah sakit. (TP)

ASAHAN, BN –Puluhan siswa MTsN2 Kisaran, Kabupaten Asahan dilarikan ke rumah sakit setelah diduga mengalami keracunan usai mengonsumsi makanan Gizi Gratis (MBG), Senin (14/9/2026).

Kasi Humas Polres Asahan AKP Herli Damarnik membenarkan adanya peristiwa tersebut. Ia menyebut, sampai saat ini korban masih dalam pendataan yang mengalami gejala setelah mengonsumsi makanan MBG.

Puluhan Siswa MTsN2 Kisaran Diduga Keracunan MBG, Dilarikan ke Rumah Sakit. “Ya, benar ada siswa yang mengalami keracunan MBG itu. Itu siswa MTsN 2 Kisaran,” ungkapnya saat dikonfirmasi oleh awak media.

Herlina mengatakan, saat ini pihak Rumah sakit langsung mengambil langkah untuk menindaklanjuti kejadian tersebut. Tim juga mengambil sampel makanan MBG yang diduga berkaitan dengan munculnya gejala pada para siswa.

Kasus dugaan keracunan MBG ini menambah daftar kejadian serupa di Sumatera Utara. Sebelumnya, pada awal September 2026, puluhan siswa di Kabupaten karo juga mengalami gejala keracunan setelah mengonsumsi makanan MBG. (TP)

Polda Babel Ringkus Korlap Penyelundup Timah 8 Ton

BELITUNG TIMUR, BN - Polisi meringkus F alias FR, buronan kasus penyelundupan pasir timah seberat 8 ton di Belitung Timur (Beltim). Feri yang disebut sebagai koordinator lapangan (Korlap) penyelundupan timah itu diamankan di Desa Padang, Kec Manggar, pada Rabu (23/9/2026).

“Terduga pelaku sekaligus Korlap di kasus 8 ton pasir timah Belitung Timur atas nama inisial FR sudah berhasil diamankan oleh Ditpolairud Polda Babel, tadi pagi,” jelas Kabid Humas Polda Babel Kombes Agus Sugiyarso kepada detikSumbagsel, Rabu.

Kata Agus, FR diamankan di kediamannya di Desa Padang Manggar, pukul 10.00 WIB. Pelaku langsung diterbangkan dari Belitung ke Pulau Bangka dan saat ini masih menjalani pemeriksaan. “FR sudah berada di Mako Polairud untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut,” singkat Kabid.

Pasir timah seberat 8 ton tersebut berhasil digagalkan penyelundupannya, pada Rabu (16/9) pukul 18.30 WIB di Pelabuhan Roda Emas, Kecamatan Lenggang Gantung. Dalam kasus ini, sopir truk inisial HL (51) sudah ditetapkan sebagai tersangka.

“Dua orang yang diamankan sebelumnya yakni



Tersangka saat digelandang polisi.

penyelundupan timah tersebut.

“Tim terus melakukan pencarian terkait keberadaan FR ini, hingga akhirnya berhasil mengamankan terduga pelaku FR di salah satu rumah di Desa Padang, Belitung Timur,” tegasnya kembali.

“Modus operandi terduga pelaku yakni melakukan pengangkutan pasir timah tanpa izin (ilegal) ke luar Pulau Belitung dengan satu unit truk,” timpalnya.

Polda Bangka Belitung memastikan kasus penyelundupan 8 ton tersebut ditangani profesional. Masyarakat diminta jangan khawatir dan jangan terpengaruh opini yang belum diketahui faktanya.

“Kami dari Kepolisian berharap masyarakat tidak menarik kesimpulan berdasarkan opini yang berkembang tanpa mendasari hasil pemeriksaan ataupun fakta penyidikan yang dilakukan oleh penyidik,” tambahhya. (as/sumber detik.com)

Disnakerkop UKM Belitung Timur Latih 31 Pemuda Jadi Teknisi AC

BELITUNG TIMUR, BN - Pemerintah Kabupaten Belitung Timur melalui Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (Disnakerkop UKM) mengadakan Pelatihan Perawat AC Residential Tahun 2026 yang diikuti oleh 31 peserta asal Kabupaten Belitung Timur.

Kepala Disnakerkop UKM Kabupaten Belitung Timur, Amrullah, mengatakan pelatihan ini dirancang untuk mencetak tenaga kerja terampil akan kebutuhan jasa perawatan AC di Belitung Timur.

Disebutkan Amrullah, sebanyak 31 peserta pelatihan tersebut terbagi dalam dua kelompok atau paket program pembinaan. “Ini merupakan kegiatan Disnakerkop UKM Beltim, yaitu pelatihan perawat AC residential. Peserta paket pertama dari dinas sebanyak 16 orang, dan paket kedua bekerja sama dengan BPVP Belitung sebanyak 15 orang, sehingga totalnya ada 31 peserta,” ujar Amrullah, Selasa (29/9/2026).

Ia mengungkapkan, ke depannya program pelatihan berbasis keterampilan di Disnakerkop UKM Beltim akan terus disesuaikan pada kebutuhan pasar dan industri lokal. Pihak dinas juga telah menyiapkan deretan program seperti pelatihan menjahit, tata boga (bakery), hingga pelatihan vokasi khusus bagi para penyandang disabilitas. “Kami ingin menyiapkan tenaga kerja terampil yang betul-betul mempunyai keahlian spesifik untuk mengisi ruang-ruang pekerjaan di daerah, khususnya perawatan AC residential ini,” ucapnya.

Sementara itu, Instruktur Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BPVP) Belitung sekaligus Subkoordinator Bidang Penyelenggaraan Pelatihan Vokasi dan



Peningkatan Produktivitas, Ben Wahyu Hutagalung, menjelaskan kurikulum yang bakal diterima para peserta.

Ben mengatakan para peserta tidak hanya diajarkan cara mencuci atau membersihkan unit AC saja.

Peserta akan diberikan pengenalan alat-alat ukur kelistrikan modern seperti manifold dan tang ampere, hingga teknik perawatan mendalam.

“Yang diajarkan dasar utamanya mencuci AC. Tetapi di situ ada pengenalan peralatan teknis dulu. Nanti juga saya tambahkan materi pelatihan kelistrikan unit outdoor serta teknik pengelasan pipa,” jelas Ben.

Tujuannya agar para alumni pelatihan memiliki daya saing tinggi saat terjun ke dunia kerja maupun membuka usaha mandiri. Kata Ben, ketersediaan teknisi AC profesional di Belitung Timur saat ini masih sangat minim dan belum mampu mengimbangi permintaan pasar.

Bahkan, sejumlah pengelola jasa akomodasi dan perhotelan di Belitung Timur sering mengeluh kesulitan dalam mendapatkan teknisi lokal yang bersertifikat.

“Masyarakat Kabupaten Belitung Timur masih kekurangan teknisi. Kemarin juga banyak pihak hotel yang menghubungi saya langsung untuk mencari teknisi AC,” katanya.

Oleh karena itu, Ben berharap para peserta dapat menyerap ilmu yang diberikan sebagai modal menembus dunia kerja atau mungkin menciptakan lapangan kerja baru. Sinergi ini juga diharapkan mampu menekan angka pengangguran terbuka sekaligus memperkuat ekosistem jasa dan pariwisata daerah.

(as/sumber Posbelitung.co)

Bupati Asahan Lepas Kontingen Sepak Bola Piala Soeratin U-13 dan U-15

ASAHAN, BN - Bupati Asahan Taufik Zainal Abidin, S.Sos., M.Si., secara resmi melepas tim sepak bola kontingen Kabupaten Asahan yang akan berlaga dalam ajang Piala Soeratin kategori U-13 dan U-15, Sabtu (05/09/2026). Upacara pelepasan berlangsung di Pendopo Rumah Dinas Bupati Asahan, dihadiri Kapolres Asahan, pelatih tim beserta seluruh peserta, serta tamu undangan lainnya.

Pelatih Tim Sepak Bola Kontingen Kabupaten Asahan, Aipda Rudi Irawan, S.H., menyampaikan rasa terima kasih yang mendalam kepada Bupati Asahan atas dukungan dan kesempatan yang diberikan kepada para pemain untuk berlaga memperebutkan Piala Soeratin tingkat Sumatera Utara.

“Kami berterima kasih kepada Bupati Asahan yang telah berkenan melepas kami untuk bertanding dalam rangka memperebutkan



Tim Kontingen Sepak Bola Piala Soeratin U-13 dan U-15. (tp)

Piala Soeratin U-13 dan U-15 di Sumatera Utara. Pertandingan akan berlangsung pada 6 hingga 11 September 2026. Seluruh pemain yang berangkat berusia 13 hingga 15 tahun, dan semuanya adalah putra asli Kabupaten Asahan,” ujarnya.

Dalam arahannya, Bupati Asahan memberikan semangat sekaligus pesan penting kepada para atlet. “Selamat bertanding. Jaga sportivitas dan selalu jaga nama baik Kabupaten Asahan. Kami akan terus mendukung anak-anak kami di lapangan. Kami berharap kalian dapat

menjadi juara dan berhak mewakili Sumatera Utara di tingkat Nasional nantinya,” ungkap Bupati.

Lebih lanjut, Bupati menyampaikan komitmen Pemerintah Kabupaten Asahan dalam pembinaan olahraga usia dini. “Ke depannya, kami akan menggelar berbagai even olahraga untuk menemukan potensi-potensi mudadi Asahan, agar semakin banyak bibit unggul lahir dari daerah ini. Tetap jaga kesehatan, belajar yang baik, dan jauhkan diri dari narkoba serta tindakan kriminalitas,” pesannya. (TP)

Bupati Asahan Buka Jambore Kader Posyandu XIII, Kader Terbaik Diberi Hadiah Umrah



Asahan, BN – Bupati Asahan Taufik Zainal Abidin, S.Sos., M.Si secara resmi membuka Jambore Kader Posyandu XIII Tingkat JKabupaten Asahan Tahun 2026 si Alun-alun Rambata Rata Raya Kisaran, Minggu (13/9) pukul 09.00 WIB. Sebagai bentuk apresiasi istimewa, kader Posyandu terbaik akan dihadiahkan perjalanan ibadah Umrah bagi yang beragama Islam dan uang tunai bagi yang non-Muslim.

Kegiatan dihadiri Wakil Bupati Asahan, Ketua

DPRD, Kajari, Ketua PN Kisaran, Dandim, Kapolres, Sekretaris Daerah, jajaran pimpinan OPD, Camat se-Kabupaten, Kepala Puskesmas, serta ratusan kader Posyandu dari 25 kecamatan. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Asahan, dr. Hari Sapna, M.KM., dalam laporannya menyebut jambore tahun ini mengusung tema “Kader Terampil, Posyandu Kuat, Asahan Sehat, Menuju Indonesia Emas 2045.”

Terselenggara berpedoman pada arahan Kementerian Kesehatan RI dan Dinas Kesehatan Provinsi Sumut, kegiatan bertujuan memperkuat kolaborasi lintas tingkat pemerintahan serta meningkatkan kompetensi kader agar pelayanan kepada masyarakat semakin optimal. Hampir 950 Posyandu tersebar di seluruh wilayah kabupaten.

Berbagai kegiatan digelar: senam sehat bersama, sarasehan, lomba keterampilan dasar kader, skriningkesehatan gratis termasuk pemeriksaan HPV DNA,masak danmakan bersama kerangdara, serta pemberian penghargaan atas dedikasi penelusuran kasus Tuberkulosis. (Tp)

AWPI Audiensi Dengan Inspektorat Subang, Persoalkan LPJ/SPJ Desa Margahayu Tahun 2019 - 2020



AWPI Subang ketika mengunjungi Inspektorat Daerah (Irda) Kabupaten Subang. (ist)

SUBANG, BN – Asosiasi Wartawan Profesional Indonesia (AWPI) Kabupaten Subang melakukan audiensi dengan Inspektorat Daerah (Irda) Kabupaten Subang, Selasa (29/9/2026). Audiensi berlangsung di ruang audiensi Inspektorat Daerah Kabupaten Subang.

Dalam pertemuan tersebut, AWPI menyampaikan sejumlah pertanyaan terkait tata kelola dan pertanggungjawaban keuangan Desa Margahayu, Kecamatan Pagaden Barat, Kabupaten Subang, khususnya mengenai dugaan belum terselesaikannya dokumen Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) dan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) tahun anggaran 2019–2020.

AWPI mempertanyakan bagaimana mekanisme pengelolaan dan pencairan anggaran desa pada tahun berikutnya apabila laporan pertanggungjawaban tahun sebelumnya memang belum diselesaikan.

Pertanyaan tersebut menjadi penting untuk diklarifikasi karena pengelolaan keuangan desa wajib dilaksanakan berdasarkan prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipasi serta tertib dan disiplin anggaran.

Secara normatif, Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa mengatur bahwa Kepala Desa wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi APB Desa kepada Bupati/Wali Kota melalui Camat setiap akhir tahun anggaran. Laporan tersebut paling lambat disampaikan tiga bulan setelah berakhirnya tahun anggaran dan ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Selain itu, Kabupaten Subang juga memiliki Peraturan Bupati Subang Nomor 44 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, yang mulai berlaku pada 26 Juni 2019. Peraturan tersebut kemudian mengalami perubahan melalui Perbup Subang Nomor 109 Tahun 2019 dan Perbup Subang No 20 Tahun 2020.

Menanggapi pertanyaan AWPI tersebut, Sekretaris Inspektorat Daerah Kabupaten Subang, Herdi, menyampaikan bahwa pihaknya akan melakukan pengecekan terlebih dahulu kepada auditor maupun pengawas yang menangani Desa Margahayu.

Herdi mengatakan, pihak Inspektorat akan melihat secara langsung dokumen LPJ dan SPJ Desa Margahayu untuk memastikan apakah benar terdapat dokumen pertanggungjawaban yang belum dibuat atau belum diselesaikan untuk tahun anggaran 2019–2020.

“Kami akan menanyakan langsung kepada auditor atau pengawas di lapangan. Kami akan melihat LPJ dan SPJ tersebut nanti, apakah betul Desa Margahayu belum membuat LPJ dan SPJ tahun 2019–2020,” ujar Herdi dalam audiensi tersebut.

Menurut Herdi, setiap hasil pemeriksaan atau audit terhadap desa akan dituangkan dalam laporan hasil pemeriksaan dan diteruskan sesuai mekanisme kepada Bupati Subang. “Setiap laporan hasil audit di setiap desa akan kami teruskan laporannya kepada Bupati Subang,” lanjutnya.

Dalam audiensi tersebut, Herdi juga meminta waktu kepada jajaran AWPI untuk melakukan penelusuran dan memastikan kondisi administrasi Desa Margahayu.

Inspektorat menyampaikan akan memberikan kepastian hasil pengecekan pada 4 Oktober 2026 setelah auditor atau pengawas terkait melakukan verifikasi terhadap dokumen yang ada. (M.Tohir)

Ketua DPC PJS Labuhanbatu Apresiasi Putusan DKPP RI, Ketua Bawaslu Diberhentikan dari Jabatannya



Muhammad Nuh Nasution, Ketua DPC Pro Jurnalis Media Siber (PJS) Labuhanbatu. (ist)

LABUHANBATU, BN – Ketua DPC Pro Jurnalis Media Siber (PJS) Labuhanbatu, Muhammad Nuh Nasution, menyampaikan apresiasi terhadap putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Republik Indonesia yang menjatuhkan sanksi pemberhentian dari jabatan Ketua Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu.

Putusan tersebut berkaitan dengan perkara Nomor 14-PKE-DKPP/VII/2026. Dalam amar putusannya, DKPP menggabungkan pengaduan untuk sebagian serta menjatuhkan sanksi peringatan keras terakhir dan pemberhentian dari jabatan Ketua kepada teradu selaku Ketua merangkap Anggota Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu.

DKPP juga memerintahkan Bawaslu untuk melaksanakan putusan tersebut paling lama tujuh hari sejak putusan dibacakan oleh hakim. Muhammad Nuh Nasution mengatakan, putusan DKPP merupakan bagian dari mekanisme penegakan kode etik penyelenggara pemilu yang harus dihormati oleh seluruh pihak. “DPC PJS Labuhanbatu menghormati dan mengapresiasi putusan DKPP RI. Kami berharap putusan ini menjadi momentum untuk memperkuat integritas, profesionalitas dan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga penyelenggara pemilu,” ujar Muhammad Nuh. Selasa (29/09/2026).

Menurutnya, penyelenggara pemilu memiliki tanggung jawab besar dalam menjaga kepercayaan publik. Karena itu, setiap penyelenggara wajib menjalankan tugas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan serta kode etik yang berlaku.

Ia menambahkan, pers sebagai bagian dari kontrol sosial juga memiliki tanggung jawab untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat secara berimbang, berdasarkan fakta dan sumber yang dapat dipertanggungjawabkan.

“PJS Labuhanbatu akan terus mendorong insan pers untuk menjalankan fungsi jurnalistik secara profesional, berimbang dan tetap menghormati proses hukum serta keputusan lembaga yang berwenang,” katanya. (M. SUKMA)

Geledah Kanwil ...

jual-beli jabatan di lingkungan Kementerian ATR/ BPN. Begini penampakan uang tersebut saat KPK menemukannya.

Dari foto yang diterima media, uang senilai ratusan juta rupiah tersebut tampak diletakkan di atas meja sebuah ruangan. Ketebalan tumpukan uang itu beragam.

Uang itu terdiri dari pecahan Rp 5.000, Rp 50 ribu, hingga Rp 100 ribu. Terlihat di lokasi sudah ada petugas KPK yang tengah menghitungnya menggunakan mesin hitung uang.

Selain itu, KPK juga menyita perhiasan berupa emas dalam pengeledahan tersebut. Perhiasan emas itu diduga dibeli menggunakan sebagian uang dari para pemohon layanan tanah. “Diduga diperoleh dari uang-uang yang dikumpulkan para oknum,” jelas jubir KPK Budi Prasetyo kepada wartawan.

Nilai perhiasan emas itu ditaksir mencapai puluhan juta rupiah. Penyidik pun saat ini masih menelusuri temuan tersebut. “Estimasi awal nilainya mencapai puluhan juta rupiah. Penyidik tentunya akan dalam maksud dan tujuan para oknum melakukan konversi uang ke dalam bentuk perhiasan tersebut,” imbuhnya.

Adapun pengeledahan di Kanwil BPN Jatim dilakukan KPK pada Kamis (24/9). Penyidik KPK melakukan pengeledahan selama 11 jam.

Selain itu, penyidik menyita beberapa dokumen dan barang bukti elektronik yang diduga terkait dengan perkara ini. Seluruh temuan itu kini tengah

Sambungan hal 1

dalam analisis penyidik.

KPK sebelumnya menetapkan delapan tersangka dalam kasus dugaan suap pembukaan blokir lahan Summarecon di Kabupaten Bogor. Selain itu, KPK mengusut dugaan jual-beli jabatan di lingkungan Kementerian ATR/BPN.

“Terkait dengan dugaan penerimaan lainnya, baik penerimaan-penerimaan dari internal yang berkaitan dengan rotasi, promosi, ataupun mutasi jabatan, diduga juga penerimaan yang dilakukan para oknum di Kementerian ATR/BPN ini berkaitan dengan layanan pertanian lainnya,” jelas jubir KPK Budi Prasetyo di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, seperti dikutip, Jumat (18/9).

Berikut daftar delapan tersangka dalam kasus ini:

1. Lampri (LMP) selaku Dirjen Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang ATR/BPN;
2. Sontang Coin Manurung (SON) selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor I;
3. Adrianto Pitojo Adi (ADR) selaku Direktur Utama (Dirut) Summarecon;
4. Arif Sugiyanto (ARF);
5. Fahd El Fouz atau Fahd A Rafiq (FEZ);
6. Rizal Pahlevi (LEV) selaku pihak swasta;
7. Erwin (ERW);
8. Muhammad Fakhry (MF).

KPK menyita uang Rp 106,3 miliar dalam kasus ini. Jumlah ini menjadi yang terbesar sepanjang sejarah OTT KPK. (sumber: detik.com)

Sambungan hal 1

Proyek Tanker ...

sama sekali tidak direspon”, ucap Sulistyو dengan nada kesal.

Akibat adanya kerugian uang negara ratusan milyar di perusahaan DPS, akhirnya pada 20 November 2024, pihaknya melaporkan rangkaian kasus dugaan korupsi itu ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yakni adanya dugaan tindak pidana korupsi (TPK) yang dilakukan direksi PT.DPS (Persero) terhadap pengadaan satu kapal tanker dengan bobot 6500 ton pesanan PT.Pertamina (Persero) dan 2 Kapal Tugboat Kapal Tunda Kap.2 x 1800 HP untuk cabang Dumai pesanan PT.Pelindo dengan nilai kontrak Rp 135,811 milyar yang saat ini semuanya mengalami mangkrak di perusahaan DPS.

Selain itu, aset yang disewakan DPS kepada PT.Multi Berkah menyalahi aturan. Seharusnya maksimal 5 tahun, tetapi menjadi 20 tahun dan kasus penjualan aset DPS kepada pihak lain dimana uang hasil penjualannya dijanjikan untuk membayar uang pesangon para pensiunan dan diPHK, tetapi tidak dilakukan oleh direksi DPS serta adanya dugaan TPK terhadap dana pensiun para pegawai sebesar Rp 130 milyar.

Akibat laporan pengaduan itu, papar Sulistyو, dirinya sudah empat kali dipanggil oleh pihak KPK di Jakarta untuk memberikan keterangan. “Saya gak bisa datang, terus KPK minta keterangan saya lewat telpon. Laporan saya waktu itu disertai dengan penyerahan sejumlah dokumen dan data-data akurat yang cukup”, ungkap Sulistyو. Seingat Sulistyو, laporannya tercatat dengan nomor informasi :

2024-A-04143 sampai 04144 di KPK.

Khusus penyelewengan uang kontrak senilai Rp 135,811 milyar bagi 2 Kapal Tugboat pesanan Pelindo Belawan, Medan, jelas Sulistyو, sekitar Februari 2026 Ir.Bambang Soenjasmore, dirut PT.DPS ditangkap dan dibawa ke Medan oleh Jaksda dari Kejati Sumatera Utara dan sudah dijatuhi pidana penjara selama 10 tahun oleh Pengadilan Tipikor Medan beberapa bulan yang lalu.

Sedangkan sewaktu terjadinya kasus mangkraknya kapal-kapal tersebut, paparnya, ketika Moh. Faisol menjabat Direktur Keuangan DPS, Diana Rosa menjabat Direktur Operasi dan Teknik DPS yang oleh puluhan eks pegawai DPS dinilai gagal menyelesaikan pembangunan satu unit kapal tanker Pertamina di DPS dan 2 Kapal Tunda Pelindo mengakibatkan kerugian keuangan negara, justru sekarang menjabat direktur Operasi di PT.PAL dan Arizal Z menjabat Sekretaris Perusahaan DPS sejak 2016.

“Tetapi ketiganya malah lolos dari proses penyidikan Kejati Sumatera Utara. Ada apa dengan Kementerian BUMN waktu itu ?”, ucap para eks pegawai dengan nada heran via pesan Whatsapp Jumat malam (25/9/2026). Kepasrahan Ir.Bambang Soenjasmore terhadap proses hukum pada dirinya, kata Sulistyو, sebagai wujud tanggungjawab moral seorang pemimpin yang amanah terhadap kinerja bawahan-nya yang amburadul selama dalam kepemimpinannya.

Sementara perusahaan PT.DPS sendiri sudah diputus pailit oleh PN Niaga Surabaya pada 3 Juli lalu

yang diduga sengaja diajukan untuk menghindari tuntutan dana pensiun dan pesangon para eks pegawai sebesar Rp 149 milyar merupakan hak 129 orang pensiunan dan yang diPHK DPS belum dibayarkan, ujar mereka, juga untuk menghilangkan jejak dokumen dan data-data terkait uang kontrak pembangunan kapal tanker Pertamina yang mangkrak.

Ketika Arizal Z, selaku mantan Plt.Dirut PT.DPS pada awal 2026 dimintai konfirmasi sekitar awal Agustus 2026 oleh media Bidik Nasional melalui pesan Whatsapp di ponselnya terkait adanya kasus mangkraknya kapal tanker pesanan Pertamina, alasan pengajuan pailit yang kemudian dikabulkan PN Niaga Surabaya pada 3 Juli 2026 dan pertanyaan lain2, hingga berita ini ditulis/ diekspos tidak memberikan jawaban apa pun.

Begitu pula dikonfirmasi dengan tiga pertanyaan melalui aplikasi yang sama kepada Diana Rosa pada Sabtu (26/9/2026) pulul 14.07 WIB dimana ketika awal perjanjian pembangunan 1 kapal tanker Pertamina dan 2 Kapal Tugboat Kapal Tunda Kap.2 x 1800 HP pesanan PT.Pelindo Medan dengan nilai kontrak Rp 135,811 Milyar pada 2018 yang kemudian ketiga kapal itu mengalami mangkrak, sedang menjabat sebagai direktur Operasi dan Teknik DPS, namun hingga Minggu sore ini (27/9/2026) belum dibalasnya. Publik minta KPK usut tuntas dugaan korupsi kolektif di perusahaan DPS dan sinergitas antara Pertamina dan Djakarta Loyd dalam kasus pesanan kapal tanker tersebut.

(AKARIM)

Sambungan hal 3

Satpol PP Jombang Saling Lempar Tanggung Jawab?

Kendati pelanggaran kasat mata terus berlangsung dan aktivitas pabrik tetap berjalan aktif, Satpol PP Jombang selaku garda terdepan penegak Perda terkesan menahan diri. Saat dikonfirmasi, Kepala Satpol PP Jombang, Samsudi, mengklaim bahwa bidang terkait telah melakukan peninjauan ke lokasi. Namun, ia enggan merinci hasil temuan tersebut. “Bagian penegakan sudah sidak waktu itu, coba tanya ke Kabid Penegakan,” ujar Samsudi singkat.

Sayangnya, upaya transparansi terhambat saat Bidik Nasional mendatangi ruang kerja Kabid Penegakan Satpol PP Jombang untuk meminta kejelasan hasil sidak dan langkah sanksi. Yang bersangkutan sedang tidak berada di tempat. Sikap pasif dan lambannya eksekusi dari penegak Perda ini memperpanjang daftar kebocoran retribusi daerah.

Jika praktik pabrik “kucing-kucingan” perizinan ini terus dibiarkan tanpa tindakan penyegelan atau sanksi pidana, target PAD Kabupaten Jombang dipastikan akan terus menguap tanpa kendali. (Tok)

BBWS Citanduy...

bagian penting dalam memastikan pekerjaan berjalan sesuai gambar kerja, spesifikasi teknis, serta tahapan pelaksanaan yang telah ditetapkan.

Selain bentuk trap, aspek yang perlu diperhatikan dalam penanganan longsor antara lain stabilitas lereng, kondisi dan kepadatan tanah, kualitas material, sistem drainase, pengamanan kaki lereng, serta pembuangan air agar tidak meningkatkan tekanan air di dalam tanah.

Karena itu, keberhasilan pekerjaan tidak hanya dilihat dari bentuk fisik konstruksi yang telah terpasang, tetapi juga dari kemampuan konstruksi tersebut dalam menjaga kestabilan lereng dan mengurangi risiko longsor susulan.

Masyarakat sekitar diharapkan dapat ikut menjaga hasil pekerjaan agar tidak rusak serta tidak melakukan aktivitas yang berpotensi mengganggu sistem pengamanan lereng.

Pelaksanaan program tersebut menjadi salah satu bentuk penanganan BBWS Citanduy terhadap titik rawan longsor di wilayah kerja Satker SDA OP 2.

Keterangan lebih lanjut mengenai nilai kontrak, sumber anggaran, spesifikasi konstruksi, volume material, serta target penyelesaian perlu dikonfirmasi kepada PPK Haji Yahya sebagai pihak yang berwenang memberikan penjelasan teknis dan administrasi pekerjaan. (Asep sujana)

Pj. Sekda Buka Turnamen Bulutangkis Piala Bupati dan PBSI Labuhanbatu 2026



LABUHANBATU, BN – Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu terus mendorong pengembangan olahraga sekaligus pembinaan atlet muda di daerah. Komitmen tersebut salah satunya diwujudkan melalui penyelenggaraan

Turnamen Bulutangkis Piala Bupati dan PBSI Labuhanbatu Tahun 2026 yang resmi dibuka oleh Penjabat Sekretaris Daerah (Pj. Sekda) Labuhanbatu, Abdi Jaya Pohan, di GOR Rantauprapat, Jalan Lintas Sumatera, Kecamatan Bilah Barat, Selasa (29/09).

Pembukaan turnamen tersebut menjadi momentum penting dalam memperkuat pembinaan dan pengembangan potensi atlet bulutangkis di Kabupaten Labuhanbatu. Kegiatan ini juga diharapkan mampu menjadi ruang kompetisi yang sehat sekaligus mempererat silaturahmi antaratlet, pelatih, klub, pelajar, maupun masyarakat pecinta olahraga. Dalam sambutan tertulis Bupati Labuhanbatu yang disampaikan Pj. Sekda Abdi Jaya Pohan, Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu menyambut baik dan memberikan apresiasi kepada Pengurus Kabupaten (Pengkab) PBSI Labuhanbatu serta seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam menyukseskan penyelenggaraan kejuaraan itu. (M.Sukma)

Proyek Kabel ...

Sambungan hal 1

Dan Pemeliharaan III (OP III) Balai Wilayah Sungai (BWS) Bali Penida I Wayan Budiasa tidak mengetahui soal adanya kegiatan pembongkaran bangunan pengaman pantai yang berada di pantai Padang Galak.

“Mendapat informasi bahwasannya ada kegiatan pekerjaan pembongkaran bangunan pengaman pantai yang dilalui jalur proyek pemasangan pipa kabel optik, bangunan yang menjadi bagian aset pemeliharaan BWS Bali Penida OP III SDA, ia segera menyampaikan kepada staf pegawai untuk melakukan pengecekan ke lokasi proyek kegiatan”.

Diduga Belum Kantongi Izin Rekomtek.

Dari hasil kruscek petugas OP III SDA BWS Bali Penida ke lokasi proyek pemasangan kabel tanam optik yang berlokasi di ujung pesisir pantai Padang Galak, Ketut Winarsa membenarkan bahwa bangunan pengaman pantai yang menjadi pelindung abrasi dan meluapnya air laut ke daratan kondisinya rusak akibat dibongkar dilalui jalur kabel tanam optik.

“Ia juga menyampaikan seharusnya sebelum melakukan pekerjaan pembongkaran bangunan pengaman pantai yang menjadi aset pemeliharaan OP III SDA, dari pihak pemilik proyek kabel tanam optik seharusnya menyampaikan surat tembusan ke Balai Wilayah Sungai Bali Penida memohon surat izin rekomendasi teknis (rekomtek) sebelum melakukan pembongkaran bangunan pengaman pantai”.

Dari informasi yang didapat di lapangan, akan dilakukan pekerjaan instalasi kabel telekomunikasi bawah laut dengan jalur pekerjaan dari pesisir Pantai Padang Galak sampai dengan Kantor Moratel di Jalan Padang Galak sepanjang kurang lebih 350 meter dikerjakan oleh PT. Jejaring Mitra Persada, (awi).

Ketua Dewan ...

Sambungan hal 2

Dorong Klarifikasi Metodologi Survei

Selain menyoroti kinerja pemkab, Fraksi Gerindra Sidoarjo juga memberikan catatan kritis terhadap data yang dirilis oleh lembaga survei ARCI. Muzayyin mengungkapkan adanya temuan selisih atau ketidaksesuaian antara data agregat dengan rincian poin kepuasan publik yang dipaparkan.

Demi menjaga objektivitas informasi di tengah masyarakat, Gerindra secara resmi mendorong pihak ARCI untuk membuka transparansi data. “Kami mendorong adanya klarifikasi metodologis secara terbuka agar publik mendapatkan informasi yang akurat, benar, dan tidak membingungkan,” pungkas Muzayyin.

Melalui momentum kenaikan elektabilitas ini, DPC Gerindra Sidoarjo menyatakan optimismenya untuk semakin solid dalam mengawal program-program strategis dari pemerintah pusat sekaligus memperjuangkan aspirasi lokal masyarakat di tingkat daerah. (yah)

Inovasi Barcode ...

Sambungan hal 3

“Instalasi Farmasi menyediakan dua loket, yaitu loket pengambilan obat secara langsung dan loket pendaftaran antar obat ke rumah. Obat yang diantar ke rumah diprioritaskan bagi pasien yang masih memiliki persediaan obat di rumah. Namun, jika obat tersebut harus segera diminum hari itu juga, pasien wajib menunggu di loket obat,” ujar Nur Aini.

Nur Aini menjelaskan bahwa proses pengemasan dan pengantaran obat ini bekerja sama dengan PT Pos Indonesia. Saat ini, layanan antar baru mencakup wilayah sekitar Magetan dengan dikenakan tambahan ongkos kirim.

Selain inovasi pengantaran obat ke rumah, Instalasi Farmasi juga membuat terobosan kemudahan bagi pasien berupa sistem kode batang (barcode). Melalui sistem ini, pasien tidak perlu lagi berdiri mengantre di depan loket. Cukup dengan memindai barcode, pasien dapat memantau nomor antrean pengambilan obat dari area mana saja di sekitar lingkungan rumah sakit.

Di akhir penjelasannya, Nur Aini menyampaikan bahwa Instalasi Farmasi RS Sayidiman melayani sekitar 500 hingga 600 pengambilan obat setiap hari. Demi memberikan pelayanan yang nyaman dan mencegah pasien berkerumun di ruang tunggu loket, sistem barcode ini sangat efektif mengurangi kepadatan ruang antrean. Pasien pun kini bisa menunggu giliran dengan lebih nyaman di area rumah sakit. (Ashar)

Polisi Sidoarjo...

Sambungan hal 4

polisi di sekolah diharapkan para pelajar untuk senantiasa menerapkan kedisiplinan, rajin belajar, serta menghormati guru dan orang tua. Para pelajar juga diingatkan agar bijak dalam menggunakan media sosial dan tidak

mudah terpengaruh oleh informasi maupun konten negatif.

Di sekolah, Polisi Sidoarjo secara masif memberikan edukasi mengenai berbagai perilaku yang harus dihindari oleh pelajar, diantaranya penyalahgunaan narkoba, perundungan atau bullying, tawuran, bahaya radikalisme, pelanggaran tertib berlalu lintas, serta tindakan lain yang dapat merugikan diri sendiri maupun orang lain.

“Mari jadilah generasi muda yang disiplin, berprestasi dan berkarakter. Manfaatkan waktu untuk belajar dan mengembangkan potensi diri, serta jauhi segala bentuk perilaku negatif yang dapat merusak masa depan,” pesan Kapolresta Sidoarjo Kombes. Pol. Christian Tobing.

Melalui kegiatan pembinaan tersebut, kepolisian

berharap para pelajar semakin memahami pentingnya kedisiplinan, tanggung jawab, serta menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungan sekolah.

Ia juga mengajak pihak sekolah, guru, dan para siswa untuk terus membangun komunikasi serta kerja sama dengan kepolisian. Sinergitas tersebut dinilai penting sebagai bagian dari upaya bersama menciptakan lingkungan pendidikan yang aman, nyaman dan kondusif di wilayah hukum Kabupaten Sidoarjo.

Kegiatan upacara bendera sekaligus pembinaan pelajar ini menjadi salah satu bentuk kehadiran Polri di tengah lingkungan pendidikan, tidak hanya dalam menjaga keamanan, tetapi juga memberikan edukasi dan menanamkan nilai-nilai positif kepada generasi penerus bangsa. (yah)

DPRD Kota Pasuruan Sahkan Raperda P-APBD 2026



Penandatanganan Bersama Nota Persetujuan Raperda P-APBD Kota Pasuruan Tahun Anggaran 2026

PASURUAN KOTA, BN- Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (P-APBD) Kota Pasuruan Tahun Anggaran 2026 secara resmi telah disahkan.

Persetujuan tersebut dicapai dalam Rapat Paripurna IV Pembahasan Raperda P-APBD Kota Pasuruan Tahun Anggaran 2026. Pengesahan itu ditandai penandatanganan bersama nota kesepakatan Kepala Daerah dan DPRD Kota Pasuruan, Rabu (24/9).

Berdasarkan dokumen Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 yang disepakati. Total anggaran belanja Pemerintah Kota Pasuruan mengalami penyesuaian dari Rp 920.99 miliar menjadi Rp

936.55 miliar atau bertambah Rp 15.56 miliar. Sementara itu, target pendapatan daerah disesuaikan naik dari Rp 802.37 miliar menjadi Rp 804.13 miliar.

Ketua DPRD Kota Pasuruan, H. Toyib menegaskan bahwa persetujuan Raperda P-APBD yang disahkan pada hari ini telah melalui semua tahapan pembahasan sesuai dengan mekanisme yang berlaku.

Lebih lanjut Politisi senior Partai Golkar tersebut memberi catatan tegas agar setiap program memiliki indikator keberhasilan yang terukur, berdampak bagi kesejahteraan masyarakat Kota Pasuruan. “Meski seluruh Fraksi DPRD Kota Pasurua menyetujui Raperda Perubahan APBD ini. Pembahasannya

diwarnai catatan strategis dan kritis terkait efektivitas belanja hingga ketepatan sasaran di

PASURUANKOTA, BN -Sebelumnya, DPRD Kota Pasuruantelah melaksanakan Rapat Paripurna III Penyampaian Jawaban Eksekutif atas Pemandangan Umum Fraksi-fraksi tentang Rancangan Peraturan Daerah Perubahan APBD Kota Pasuruan Tahun Anggaran 2026, Rabu (23/9/2026).

Dalam agenda tersebut, masing-masing fraksi DPRD Kota Pasuruan menyampaikan catatan, rekomendasi setelah mencermati jawaban Pemerintah Kota Pasuruan.

Pendapat akhir fraksi-fraksi menjadi bagian penting dalam proses pembahasan Rancangan

Peraturan Daerah Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026. Seluruh catatan menekankan pentingnya pengelolaan anggaran daerah yang

efektif, transparan, akuntabel, tepat sasaran, serta berdampak nyata bagi pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat.

Dengan disampaikan pendapat akhir fraksi-fraksi, proses pembahasan Raperda Perubahan APBD Kota Pasuruan Tahun Anggaran

2026 akan memasuki tahapan selanjutnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(*Adv)

Rapat Paripurna III DPRD Kota Pasuruan



Rapat Paripurna III Penyampaian Jawaban Eksekutif atas Pemandangan Umum Fraksi-fraksi tentang Raperda P-APBD Kota Pasuruan 2026,

Peraturan Daerah Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026. Seluruh catatan menekankan pentingnya pengelolaan anggaran daerah yang

efektif, transparan, akuntabel, tepat sasaran, serta berdampak nyata bagi pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat.

Dengan disampaikan pendapat akhir fraksi-fraksi, proses pembahasan Raperda Perubahan APBD Kota Pasuruan Tahun Anggaran

2026 akan memasuki tahapan selanjutnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(*Adv)

Sahkan Raperda BUMD, Pemkab Pasuruan Resmi Miliki PT PLJ

❑ Babak Baru Transformasi Kelembagaan BUMD



SINERGI - Ketua DPRD Kab. Pasuruan, Samsul Hidayat (kanan) beserta Wakil Pimpinan dan Bupati Pasuruan, H.M. Rusdi Sutejo (kiri) Pamer Nota Persetujuan Raperda Non-APBD tentang PLJ Tahun 2026.

Penandatanganan Bersama Nota Persetujuan Raperda Non-APBN tentang BUMD Pasuruan Lestari Jaya (PT PLJ) oleh Ketua DPRD Kabupaten Pasuruan, Samsul Hidayat.

PASURUAN, BN - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pasuruan secara resmi pengesahkan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Non-APBD Tahun 2026 tentang Perusahaan Perseroan Daerah Pasuruan Lestari Jaya pada, Senin 21 September 2026.

Keputusan penting tersebut ditetapkan melalui Rapat Paripurna Keempat yang berlangsung di Gedung DPRD setempat dengan dihadiri oleh 38 dari total 50 anggota dewan.

Pengesahan produk hukum daerah ini menandai babak baru transformasi kelembagaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dari yang sebelumnya

PT Jalan Tol Kabupaten Pasuruan menjadi PT Pasuruan Lestari Jaya (PLJ) Persero.

Langkah reorientasi tersebut diambil guna memperluas diversifikasi bidang usaha strategis daerah agar lebih adaptif, profesional, serta akuntabel dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Dalam pidato pembukaan Ketua DPRD Kabupaten Pasuruan, Samsul Hidayat menegaskan bahwa Raperda Non-APBD yang disetujui pada hari ini telah melalui semua tahapan pembahasan sesuai mekanisme yang berlaku.

Mulai, pengharmonisasian di Kantor Wilayah Kementerian Hukum Provinsi Jawa Timur, pem-

bahasan mendalam Pansus, hingga fasilitasi Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

“Persetujuan Raperda menjadi Perda Non-APBD tentang PT Pasuruan Lestari Jaya (PLJ) merupakan bukti kepedulian dan keseriusan Dewan memunculkan produk hukum berkualitas, transparan dan akuntabel demi kepastian hukum bagi masyarakat,” tegas Ketua DPRD Kabupaten Pasuruan, Samsul Hidayat.

Penyempurnaan atau penataan ulang produk hukum tersebut secara otomatis menggantikan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2006 yang dinilai sudah tidak relevan dengan regulasi terkini maupun

kebutuhan pengembangan ekosistem bisnis daerah.

Lebih lanjut dijelaskan, melalui payung hukum anyar tersebut, cakupan bisnis PT PLJ Persero bakal meluas ke berbagai lini komersial produktif. Imbuhnya.

Juru Bicara Pansus II DPRD Kabupaten Pasuruan, Gaung Andaka menerangkan cakupan bisnis PT PLJ Persero bakal meluas ke berbagai sektor komersial produktif meliputi:

1. Penyediaan akomodasi;
2. Periklanan;
3. Pariwisata;
4. Konstruksi;
5. Perbelanjaan;
6. pengelolaan Limbah;

7. Pusat perdagangan, dan
8. Transportasi.

Diversifikasi skala besar ini diproyeksi kedepan mampu memperkuat struktur permodalan daerah sekaligus membuka multipliereffect bagi perekonomian lokal.

“PT PLJ Persero dibentuk untuk mengelola potensi ekonomi daerah secara terintegrasi dan profesional. Hal ini bertujuan menciptakan nilai tambah ekonomi daerah, mendorong pemerataan pembangunan, sekaligus memberikan kontribusi nyata terhadap PAD melalui dividen yang sehat,” terang Politisi Partai Golkar tersebut.(*Adv)